



LAPORAN KINERJA

DIREKTORAT PENGEMBANGAN
SATUAN PERMUKIMAN DAN PUSAT
SATUAN KAWASAN PENGEMBANGAN

2024



KATA PENGANTAR

Sebagai tindak lanjut selesainya pelaksanaan kegiatan Direktorat Pengembangan Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan Tahun 2024, maka disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) Direktorat Pengembangan Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan, sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi serta Renstra Tahun 2024.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) Direktorat Pengembangan Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan Tahun 2024 disusun berdasarkan Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) Direktorat Pengembangan Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan Tahun 2024 diharapkan dokumen ini dapat memberikan manfaat sebagai bahan evaluasi kinerja maupun penentuan arah kebijakan tahun berikutnya.

Jakarta, Januari 2024
Direktur
Pengembangan Satuan Permukiman dan
Pusat Satuan Kawasan Pengembangan,

Rully Rachman, S.H., M.H
NIP. 19740403 200112 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	2
Daftar Isi	3
Daftar Tabel.....	4
Daftar Lampiran	4
Ringkasan Eksekutif	6
Indikator Kinerja Utama Dit. PSP dan PSKP Tahun 2024	7
Capaian Kinerja Dit. PSP dan PSKP Tahun 2024.....	10
Perkembangan Dit. PSP dan PSKP Tahun 2024	10
Realisasi kinerja Dit. PSP dan PSKP Tahun 2024.....	13
Capaian Output Dit. PSP dan PSKP Tahun 2024	14
BAB I PENDAHULUAN	19
1.1. Tugas dan Fungsi	19
1.2. Struktur Organisasi.....	28
1.3. Tujuan.....	28
1.4. Sistematika Penulisan	29
BAB II PERENCANAAN KINERJA	31
2.1. Target/Sasaran Berdasarkan Rencana Strategis.....	32
2.2. Target Berdasarkan Perjanjian Kinerja	33
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	36
3.1. Capaian Kinerja Organisasi.....	38
3.2. Realisasi Pelaksanaan	48
3.3. Capaian Kinerja Organisasi.....	55
BAB IV Permasalahan Dan Tindak Lanjut Tahun 2024	58
BAB V Penutup	60

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Indikator Kinerja Utama Tahun 2024	7
Tabel 2	Target dan Capaian Kinerja Dit. PSP DAN PSKP	8
Tabel 1.0	Capaian output kegiatan	13
Tabel 2.0	keberhasilan nilai capaian kinerja	16
Tabel 3.0	Struktur Organisasi	26
Tabel 3.1	Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	33
Tabel 3.2	Target dan Capaian Kinerja	34
Tabel 3.3	Realisasi Anggaran Pusat dan Daerah	56
Tabel 3.4	Permasalahan Dan Tindak Lanjut Tahun 2024.....	57

DAFTAR GAMBAR

Tabel 1	Indikator Kinerja Utama Tahun 2024	7
Tabel 2	Target dan Capaian Kinerja Dit. PSP DAN PSKP	8
Tabel 1.0	Capaian output kegiatan	13
Tabel 2.0	keberhasilan nilai capaian kinerja	16
Tabel 3.0	Struktur Organisasi	26
Tabel 3.1	Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	33
Tabel 3.2	Target dan Capaian Kinerja	34
Tabel 3.3	Realisasi Anggaran Pusat dan Daerah	56
Tabel 3.4	Permasalahan Dan Tindak Lanjut Tahun 2024.....	57

RINGKASAN EKSEKUTIF

Direktorat Pengembangan Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan tugas dan fungsi atas penggunaan anggaran yang didasarkan pada peraturan presiden No. 29 tahun 2014 tentang sistem kinerja instansi pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan Pengembangan sosial budaya dan mental spritual, pengembangan usaha dan kelembagaan, pengembangan prasarana dan sarana dan pengelolaan lingkungan, pengurusan hak atas tanah, dan Advokasi Pertanahan

Mengacu pada Renstra 2020 – 2024 dan Keputusan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Tahun 2020-2024. Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi telah ditetapkan indikator kinerja/rencana kerja Direktorat Pengembangan Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan sebagai berikut:

Tabel 1 : Indikator Kinerja Utama Direktorat Pengembangan Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan Tahun 2024

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)
Berkembangnya Satuan Permukiman Transmigrasi	Persentase SP dengan StatusPenyesuaian	50%
	Persentase SP dengan StatusPemantapan	60%
	Persentase SP dengan Status Kemandirian	45%

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)
	Persentase Jumlah Transmigran yang sudah menerima sertipikat hak milik pada tahun ke-5	61%
	Jumlah Pusat SKP yang telah berfungsi sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan Transmigrasi skala SKP	2
	Persentase Penyelesaian Masalah Pertanahan Transmigrasi yang difasilitasi penanganannya	89 Kasus
Tersedianya Kebijakan dan Regulasi Pengembangan Satuan Permukiman	Jumlah Kebijakan dan Regulasi Pengembangan Satuan Permukiman yang ditetapkan	3 Dok
Terselesaikannya tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan eksternal dan Aparat Pengawas Internal (APIP)	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal dan APIP lingkup Direktorat Pengembangan Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan yang ditindaklanjuti (Sistem Pengendalian Internal dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan)	73%

Direktorat Pengembangan Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan telah membuat Perjanjian Kinerja tahun 2024. Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Adapun perjanjian

pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Berikut dapat disampaikan capaian kinerja Direktorat Pengembangan Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan sesuai target pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2 : Target dan Capaian Kinerja Dit. PSP dan PSKP Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama	Target	Capaian	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Persentase SP dengan Status Penyesuaian	50%	50%	Rp. 3.844.250.000,-	Rp.3.570.152.715,
Persentase SP dengan Status Pemantapan	60%	60%	Rp. 6.927.939.000,-	Rp.6.003.436.447,
Persentase SP dengan Status Kemandirian	45%	45%	Rp. 9.241.384.000,-	Rp. 6.003.436.447
Persentase Jumlah Transmigrasi	60%	60%	Rp. 2.457.745.000,-	Rp. 7.306.575.552

Indikator Kinerja Utama	Target	Capaian	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
yang sudah menerima sertipikat hak milik pada tahun ke-5				
Jumlah Pusat SKP yang telah berfungsi sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan Transmigrasi skala SKP	1	1	Rp. 924.550.000,-	Rp. 2.407.747.403
Persentase Penyelesaian Masalah Pertanahan Transmigrasi yang difasilitasi penanganannya	56%	63 Kasus	Rp. 2.099.277.000,-	Rp. 923.891.000
Jumlah Kebijakan dan Regulasi Pengebangan Satu Permukiman yang ditetapkan	2 Dok	5 Dok	Rp. 657.900.000,-	Rp. 1.927.546.655

Indikator Kinerja Utama	Target	Capaian	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal dan APIP lingkup Direktorat Pengembangan Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan yang ditindaklanjuti (Sistem Pengendalian Internal dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan)	73%	57%	-	-
TOTAL			Rp.26.153.045.000,-	Rp.22.773.551.307,-

Capaian Kinerja Direktorat Pengembangan Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan dari uraian di atas terlihat bahwa pencapaian realisasi keuangan pada Direktorat Pengembangan Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan Sebesar **87,08 %** terdiri dari Satker Dit. PSP dan PSKP Pusat dan Satker daerah atau Realisasi sebesar Rp. 22.773.551.307,-(dua puluh dua miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus lima puluh satu tiga ratus tujuh rupiah) dari pagu anggaran sebesar Rp. 26.153.045.000,- (dua puluh enam miliar seratus lima puluh tiga juta empat puluh lima rupiah).

Melihat dari aspek realisasi keuangannya maka persentase pencapaian

sebesar **87,08 %**. Pelaksanaan kegiatan yang anggarannya terkena AA konsistensi penyerapan anggaran banyak yang belum optimal. Kinerja realisasi keuangan yang baik sudah seharusnya diimbangi dengan output kegiatan yang nyata dan juga dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi perkembangan kemajuan kegiatan pada Direktorat Pengembangan Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan.

Dengan ini disampaikan Hasil Indikator pada Direktorat Pengembangan Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan sesuai target pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

A. Sasaran pogram I Yaitu Berkembangnya Satuan Permukiman Transmigrasi

- 1. Persentase SP dengan status penyesuaian** yaitu pada tahap ini berlangsung selama 18 (delapan belas) bulan sejak penempatan Transmigran. Tahun 2024 terdapat 30 SP yang teranggarkan dan sudah terealisasi. Pada tahap ini untuk mencapai sasaran terwujudnya masyarakat yang mampu beradaptasi dengan lingkungan fisik dan lingkungan sosial dengan capaian 100%.
- 2. Persentase SP dengan status pemantapan** yaitu pada tahap ini pemantapan berlangsung selama 18 (delapan belas) bulan sejak berakhirnya tahap penyesuaian. Tahun ini diberikan anggaran untuk 14 SP dan sudah terealisasi. Pada tahap ini untuk mencapai sasaran terwujudnya masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hidup dari hasil produksi yang dikembangkan dengan capaian 100%.
- 3. Persentase SP dengan status kemandirian** yaitu pada tahap ini kemandirian berlangsung selama 2 (dua) tahun sejak berakhirnya tahap pemantapan. 61 SP dan desa teranggarkan pada tahun ini dan sudah terealisasi. tahap ini untuk mencapai sasaran terwujudnya masyarakat yang sudah terlibat secara

langsung dan tidak langsung dalam sistem produksi sektor unggulan dengan capaian 100%.

4. Persentase jumlah transmigran yang sudah menerima sertipikat hak milik pada tahun ke-5 dengan Jumlah transmigran pada tahun ke-5 sebanyak 1.925 transmigran, yang sudah terbit sertipikat hak miliknya pada tahun ke 5 sebanyak 1.202 transmigran dengan capaian 104,70%

5. Jumlah Pusat SKP yang telah berfungsi sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan Transmigrasi skala SKP Pusat SKP yang telah berfungsi yaitu di kabupaten Luwu Timur, Kawasan Mahalona, pada tahun ini telah dilaksanakan pekerjaan Renov SD di Pusat SKP C SP1 dan di Kabupaten Merauke Kawasan Salor pada tahun ini telah dilaksanakan pekerjaan Peningkatan Jalan di Pusat SKP dengan capaian 100%.

6. Persentase Penyelesaian Masalah Pertanahan Transmigrasi yang difasilitasi penanganannya. Data permasalahan pertanahan transmigrasi saat ini sejumlah 295 Kasus, yang sudah terfasilitasi sejumlah 63 kasus (sudah memenuhi target yang ada yaitu 56 kasus) dengan capaian 108,9%

B. Sasaran Program II yaitu Tersedianya kebijakan dan regulasi Pengembangan : Jumlah kebijakan dan regulasi Pengembangan Satuan Permukiman yang ditetapkan dengan:

1. Keputusan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Strategi Percepatan Penyelesaian Permasalahan pertanahan Transmigrasi Nomor 524 Tahun 2024;
2. Keputusan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Tim Percepatan Penyelesaian Permasalahan Pertanahan Transmigrasi Nomor 192 Tahun 2024;
3. Rancangan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah

- Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengembangan Satuan Permukiman Kawasan Transmigrasi;
4. Petunjuk teknis Prasarana sarana dan Utilitas Umum di SP dan pusat SKP;
 5. Petunjuk teknis Pengembangan usaha dan kelembagaan di SP dan pusat SKP;
 6. Draft Reviu Peraturan Menteri Tenaga Kerja Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengurusan hak Atas Tanah Transmigrasi.

C. terselesaikannya tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan eksternal dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dengan Persentase rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal dan APIP lingkup Direktorat Pengembangan Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan.

Ditindaklanjuti (Sistem Pengendalian Internal dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan) dengan ini Masih dikoordinasikan kepada pihak-pihak yang terlibat dengan mengedepankan komitmen dalam pembayaran temuan tersebut dengan capaian 58,9%

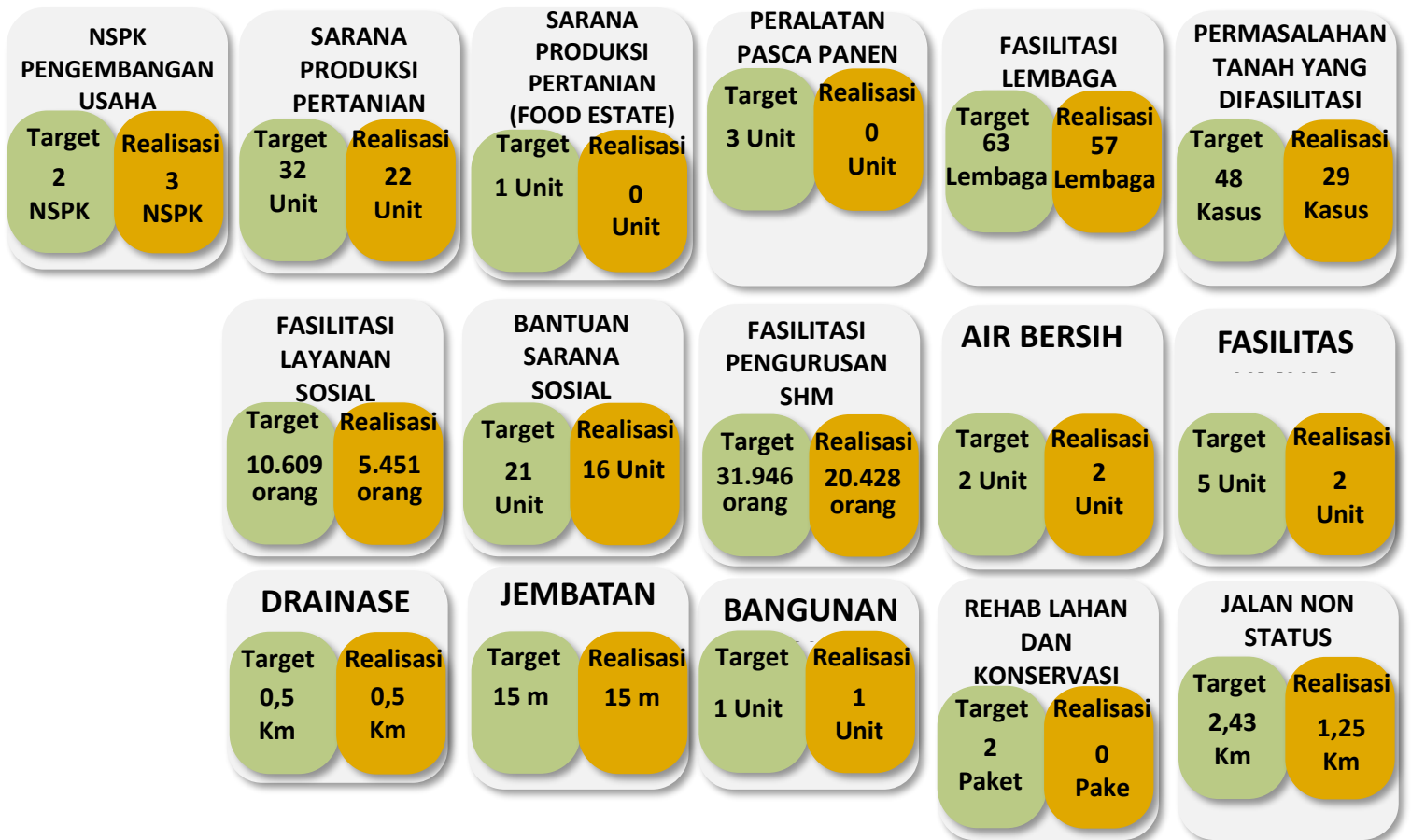
I. Analisis Keberhasilan dan Permasalahan yang dihadapi

Direktorat Pengembangan Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan bekerja berdasarkan sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Telah dikemukakan pada bab sebelumnya tentang target dan realisasi kinerja Direktorat Pengembangan Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan tahun 2024. Secara keseluruhan, kinerja Direktorat Pengembangan Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan tahun 2024 termasuk klasifikasi sangat berhasil.

Beban tugas Direktorat Pengembangan Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan adalah Berkembangnya Satuan Permukiman Transmigrasi dan Tersedianya kebijakan dan regulasi Pengembangan Satuan Permukiman serta berdasarkan pada lokus sebanyak 52 Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasoinal dan 100 Kawasan

Transmigrasi Prioritas Kementerian. Kegiatan yang dilakukan antara lain meliputi:

- Peningkatan / rehabilitasi sarana Prasarana, serta fasilitas umum permukiman dan kawasan transmigrasi;
- Fasilitasi pengurusan sertipikat hak milik;
- Penyelesaian permasalahan pertanahan;
- Layanan sosial budaya dan kelembagaan; dan
- Bantuan sarana produksi pertanian.



Gambar 1.0 Capaian Output 2024

Capaian output kegiatan dari masing-masing Direktorat Pengembangan Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan pada tahun 2024 dapat kami sampaikan melalui infografis sebagai berikut:

Faktor keberhasilan nilai capaian kinerja Direktorat Pengembangan Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan pada tahun 2024 melalui strategi yang dilaksanakan sebagai berikut:

- Adanya strategi percepatan proses pengadaan barang dan jasa

pada awal tahun anggaran 2024 melalui surat edaran Ditjen PPKTrans Nomor 18/PBJ.02.01/I/2024 tanggal 6 Januari 2024, serta melaksanakan kegiatan bantuan teknis penyiapan dokumen-dokumen pengadaan pada satker yang kekurangan SDM teknis yang kompeten;

- b. Kolaborasi dan koordinasi yang baik antara pusat dan daerah. Dukungan dan komitmen dari 74 Satker daerah penerima anggaran Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi pada Direktorat Pengembangan Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan dalam penyelenggaraan Pembangunan dan pengembangan Kawasan transmigrasi sangat membantu dalam pencapaian target kinerja.
- c. Transmigrasi didukung oleh dasar hukum yang cukup kuat, dari Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, Peraturan Pemerintah RI Nomor 3 Tahun 2014, hingga Peraturan Presiden No. 50 thn 2018, ttg kordinasi dan integrasi penyelenggaraan transmigrasi. Pelaksanaan transmigrasi yang sudah berjalan lama dan sesuai dengan aturan yang ada sudah cukup matang. Yang terakhir melalui imolementasi Perpres 50/2018 terdapat intervensi program di Kawasan Transmigrasi oleh pihak lain K/L/D/M. Walaupun belum cukup maksimal, efek dari kuatnya peraturan yang memayungi bidang ketransmigrasian bisa dirasakan terlihat dari intevensi yang dilakukan oleh K/L/D/M mampu meningkatkan nilai indikator penilaian Kawasan seperti dimensi ekonomi dan sarana dan prasarana.
- d. Berdasarkan apa yang telah dicapai sampai dengan tahun 2024 maka dengan capaian yang baik, berdasarkan capaian kinerja dan realisasi keuangan yang ada, ada beberapa permasalahan yang dihadapi dalam realisasi kegiatan dan anggaran adalah sebagai

berikut:

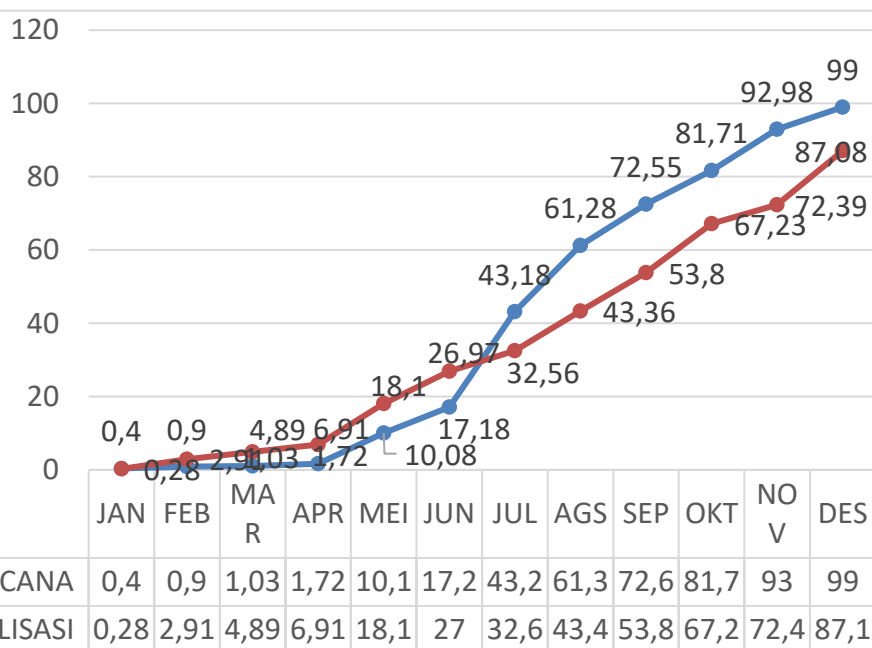
1. Tren anggaran untuk program transmigrasi yang terus menurun setiaptahunnya, padahal Animo Transmigrasi cukup besar (5.701 KK pada tahun 2024), sementara Program penempatan transmigrasi yang kecil (rata-rata 200 KK/tahun);
2. Implementasi Perpres 50 Tahun 2018 tentang koordinasi dan intergrasi pelaksanaan transmigrasi belum maksimal. Dibutuhkan optimalisasi Tim KIPT Perpres 50/2018 Pusat dan Daerah untuk berfokus intervensi pada kawasan transmigrasi yang belum berstatus berdaya saing. Hingga saat ini dari target 7 kawasan transmigrasi berdaya saing baru tercapai 3 kawasan transmigrasi berdaya saing, dibutuhkan 4 tahun untuk bisa mewujudkan hal tersebut;
3. Seringnya terjadi perubahan KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) pada Satuan Kerja di Daerah yang menghambat realisasi pekerjaan, karena dalam prosesnya membutuhkan waktu yang cukup lama;
4. Akibat blokir Automatic Pada tahun 2024 terjadi penurunan angka target akibat batal diadakan penempatan transmigran baru, yang semula sebanyak 207 KK turun menjadi 193 KK yang berimbas pada program yang lainnya: pemenuhan mandatory T+1 seperti seperti: ukur bagi lahan, Sarana Produksi Pertanian A ikut turun.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pengembangan Satuan Permukiman, dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan Ditjen PPKTrans pada TahunTahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

KURVA S RENCANA PENYERAPAN ANGGARAN 2024

DIREKTORAT PSP dan PSKP

RENCANA PENYERAPAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN DIT. PSP dan PSKP TAHUN 2024



TOTAL PAGU

Rp. 26.156.945.000

TOTAL REALISASI

87,08 %

Rp. 22.773.551.307

Realisasi Pusat dan Daerah

Pusat 85,50 %

Pagu Rp.

10.645.282.000

Realisasi Rp.

9.102.221.312

Sisa Rp.

1.543.060.688

Daerah 88,17 %

Pagu Rp.

15.507.763.000

Realisasi Rp.

13.672.797.995

Sisa Rp.

1.834.965.005

Capaian kinerja kegiatan dan anggaran Pengembangan Satuan Permukiman, dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan sampai bulan Desember 2024 Sebesar **87,08 %** terdiri dari Satker Dit. PSP dan PSKP Pusat dan Satker daerah atau Realisasi sebesar sebesar Rp. 22.773.551.307,-(dua puluh dua miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus lima puluh satu tiga ratus

tujuh rupiah) dari pagu anggaran sebesar Rp. 26.153.045.000,- (dua puluh enam miliar seratus lima puluh tiga juta empat puluh lima rupiah).

BAB I PENDAHULUAN

I. Gambaran Umum

Direktorat Pengembangan Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan adalah salah satu Unit Kerja dibawah Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan Pengembangan sosial budaya dan mental spritual, pengembangan usaha dan kelembagaan, pengembangan prasarana dan sarana dan pengelolaan lingkungan, pengurusan hak atas tanah, dan Advokasi Pertanahan.

Dalam upaya mewujudkan hal tersebut, telah disusun Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi Tahun 2021-2024 yang dijabarkan dalam program dan kegiatan tahunan. Untuk itu Direktorat Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Transmigrasi telah menyusun indikator sebagai alat ukur dalam upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) / Laporan Kinerja (LAPKIN) merupakan wujud pelaporan dari rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dan disampaikan secara tahunan dan merupakan manifestasi dari penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dilaksanakan oleh Direktorat Pengembangan Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan sebagai Unit Kerja Eselon II (UKE-II) pada Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi. Penulisan laporan ini

juga sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan keuangan negara dan sebagai sarana evaluasi Pimpinan dalam rangka pencapaian kinerja

Berdasarkan Indikator Kinerja dan Target yang telah ditetapkan. Sebagai bentuk pertanggungjawaban Pengembangan Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan transmigrasi, maka disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) / Laporan Kinerja (LAPKIN) Tahun 2024.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Direktorat Pengembangan Satuan Permukiman, dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan membawahi 1 (satu) Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok jabatan Fungsional.

Tugas dan fungsi Direktorat Pengembangan Satuan Permukiman, dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan sebagai berikut:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan sosial budaya dan mental spiritual, pengembangan usaha dan kelembagaan, pengembangan prasarana dan sarana dan pengelolaan lingkungan, pengurusan hak atas tanah, serta advokasi pertanahan di satuan permukiman dan pusat satuan kawasan pengembangan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sosial budaya dan mental spiritual, pengembangan usaha dan kelembagaan, pengembangan prasarana dan sarana dan pengelolaan lingkungan, pengurusan hak atas tanah, serta advokasi pertanahan di satuan permukiman dan pusat satuan kawasan pengembangan;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangansosial budaya dan mental spiritual, pengembangan usaha dan kelembagaan, pengembangan prasarana dan sarana dan pengelolaan lingkungan, pengurusan hak atas tanah, serta advokasi pertanahan di satuan permukiman dan pusat satuan kawasan pengembangan;

- d. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan sosialbudaya dan mental spiritual, pengembangan usaha dan kelembagaan, pengembangan prasarana dan sarana dan pengelolaan lingkungan, pengurusan hak atas tanah, serta advokasi pertanahan di satuan permukiman dan pusat satuan kawasan pengembangan;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan sosial budaya dan mental spiritual, pengembangan usaha dan kelembagaan, pengembangan prasarana dan sarana dan pengelolaan lingkungan, pengurusan hak atas tanah, serta advokasi pertanahan di satuan permukiman dan pusat satuan kawasan pengembangan;
- f. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat.

Tugas dan Fungsi Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok jabatan Fungsional pada Direktorat Pengembangan Satuan Permukiman, dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan :

Sub Bagian Tata usaha

a. Tugas

Melakukan urusan fasilitasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pelaporan kinerja, koordinasi data dan informasi, koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern, administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, serta kerumahtanggan Direktorat.

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

1. Pengurusan surat menyurat dan kearsipan Direktorat;
2. Pengurusan Kepegawaian Direktorat;
3. Pengurusan Administrasi Keuangan Rutin Direktorat;
4. Pengurusan Perlengkapan dan Rumah Tangga Direktorat;
5. Pengurusan Pembayaran Gaji Pegawai Direktorat;
6. Penyiapan dan Penyusunan Bahan Laporan Direktorat;

7. Penyiapan dan Penyusunan Program dan Anggaran Direktorat.

Kelompok jabatan Fungsional

Pengembangan Sosial Budaya dan Mental Spritual

a. Tugas

Mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi pengembangan sosial budaya dan mental spritual masyarakat satuan permukiman dan pusat satuan kawasan pengembangan.

b. Fungsi

Fungsi Pengembangan Sosial Budaya dan Mental Spritual didukung oleh kegiatan sebagai berikut:

1) Pelayanan Pendidikan dan Pembinaan

Keagamaan Dan Mental Spritual melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan pendidikan, pembinaan agama dan kerukunan beragama, dan pembinaan mental spritual masyarakat satuan permukiman dan pusat satuan kawasan pengembangan di kawasan transmigrasi;

2) Pelayanan Kesehatan Dan Keluarga Ditjen

Berencana, Serta Pemberdayaan PPKTrans Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria,

pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan dan keluarga berencana serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak satuan permukiman dan pusat satuan kawasan pengembangan di kawasan transmigrasi;

- 3) **Pengembangan Seni Budaya, Olah Raga, dan Pemberdayaan Generasi Muda** mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan seni budaya, olahraga, dan pemberdayaan generasi muda satuan permukiman dan pusat satuan kawasan pengembangan di kawasan transmigrasi.
- 4) **Pelayanan Umum Pemerintahan** mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan umum pemerintahan satuan permukiman dan pusat satuan kawasan pengembangan di kawasan transmigrasi.

Fasilitasi Pengembangan Usaha Dan Kelembagaan

a. Tugas

Melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan usaha dan kelembagaan masyarakat satuan permukiman dan pusat satuan kawasan pengembangan di kawasan transmigrasi.

b. Fungsi

Fungsi Fasilitasi Pengembangan Usaha dan Kelembagaan

didukung oleh kegiatan sebagai berikut:

- 1) **Fasilitasi Penyediaan Sarana Produksi** melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan sarana produksi masyarakat satuan permukiman dan pusat satuan kawasan pengembangan di kawasan transmigrasi.
- 2) **Bimbingan Pengembangan Budidaya dan Usaha** mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang bimbingan budidaya dan usaha masyarakat satuan permukiman dan pusat satuan kawasan pengembangan di kawasan transmigrasi.
- 3) **Pengembangan Kelembagaan Dan Fasilitasi Pendampingan** memberikan pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pembentukan, penguatan, dan pengembangan kelembagaan masyarakat serta fasilitasi pendampingan masyarakat satuan permukiman dan pusat satuan kawasan pengembangan di kawasan transmigrasi.

Pengembangan Sarana, Prasarana, Dan Utilitas Umum Serta Pengelolaan Lingkungan

a. Tugas

melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria,

pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi, rekonstruksi, dan/atau pembangunan sarana, prasarana, dan utilitas umum, serta pengelolaan lingkungan satuan permukiman dan pusat satuan kawasan pengembangan di kawasan transmigrasi.

b. Fungsi

Fungsi Pengembangan Sarana, Prasarana, Dan Utilitas Umum Serta Pengelolaan Lingkungan didukung oleh kegiatan sebagai berikut:

- 1) **pengembangan sarana, prasarana dan utilitas umum** mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi, rekonstruksi, dan/atau pembangunan sarana, prasarana, dan utilitas umum satuan permukiman dan pusat satuan kawasan pengembangan, serta jaringan prasarana konektivitas antar satuan permukiman dalam satuan kawasan pengembangan.
- 2) **pengelolaan lingkungan** mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan lingkungan satuan permukiman dan pusat satuan kawasan pengembangan.

Fasilitasi Pengurusan Hak Atas Tanah

a. Tugas

Melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan

pelaporan di bidang pengurusan hak atas tanah satuan permukiman dan pusat satuan kawasan pengembangan di kawasan transmigrasi.

b. Fungsi

Fungsi Fasilitasi Pengurusan hak atas tanah didukung oleh :

- 1) **inventarisasi penguasaan dan penggunaan tanah** melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang inventarisasi penguasaan dan penggunaan tanah satuan permukiman dan pusat satuan kawasan pengembangan di kawasan transmigrasi.
- 2) **pengukuran bidang tanah** melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengukuran bidang tanah bahan pengurusan sertifikasi hak atas tanah satuan permukiman dan pusat satuan kawasan pengembangan di kawasan transmigrasi.
- 3) **pengurusan sertifikasi hak atas tanah** melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengurusan sertifikasi hak atas tanah satuan permukiman dan pusat satuan kawasan pengembangan di kawasan transmigrasi.

Advokasi Pertanahan

a. Tugas

Melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam

penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang advokasi pertanahan satuan permukiman dan pusat satuan kawasan pengembangan di kawasan transmigrasi.

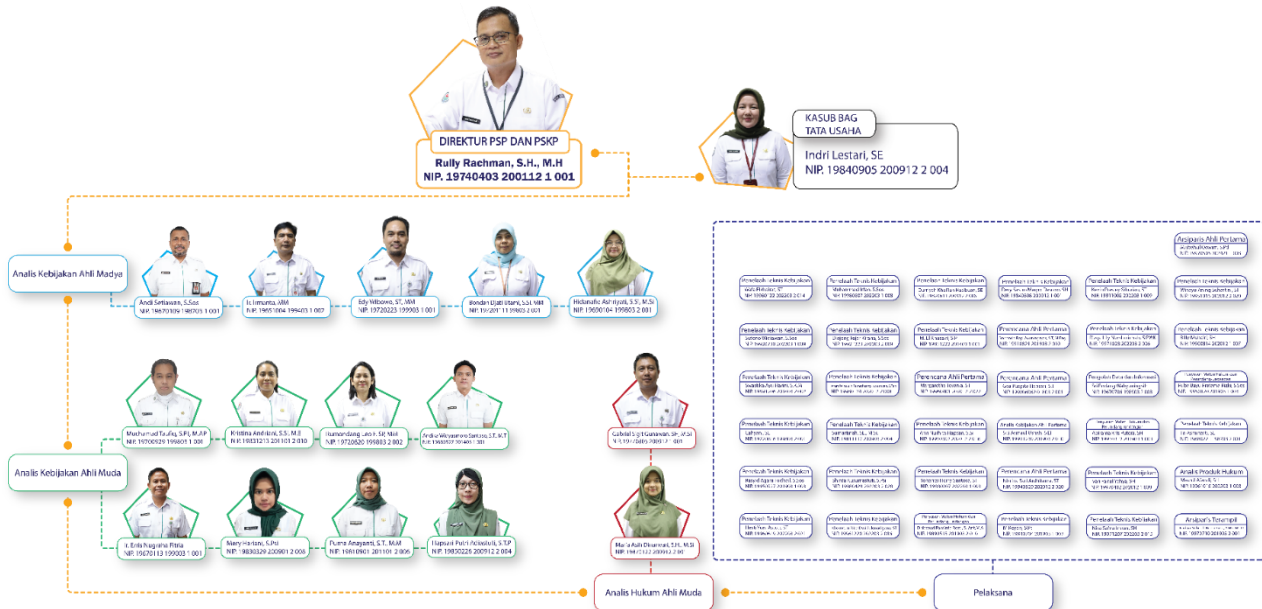
b. Fungsi

Fungsi Advokasi Pertanahan didukung oleh :

- 1) Penyuluhan Dan Mediasi Pertanahan** melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyuluhan dan mediasi pertanahan satuan permukiman dan pusat satuan kawasan pengembangan di kawasan transmigrasi.
- 2) Litigasi** Melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang advokasi pertanahan satuan permukiman dan pusat satuan kawasan pengembangan di kawasan transmigrasi melalui mekanisme litigasi.
- 3) Non Litigasi** melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang advokasi pertanahan satuan permukiman dan pusat satuan kawasan pengembangan di kawasan transmigrasi melalui mekanisme nonlitigasi.

Struktur Organisasi Direktorat Pengembangan Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan sebagaimana Lampiran 1

Gambar 3 Struktur Organisasi



II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan penyusunan ini mencakup aspek-aspek sebagai berikut:

- 1) Aspek Akuntabilitas Kinerja, bagi kebutuhan eksternal organisasi, di mana Laporan Kinerja sebagai sarana pertanggungjawaban Direktorat Pengembangan Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan Tahun berjalan.
- 2) Aspek Manajemen Kinerja, bagi kebutuhan internal organisasi, sebagai sarana evaluasi pencapaiannya oleh Pimpinan Organisasi / Unit Kerja dalam upaya perbaikan kinerjanya di masa mendatang.

III. SISTEMATIKA PENULISAN

Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Tahun 2024. Capaian kinerja (performance results) Tahun 2024 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (performance agreement) Tahun 2020 sebagai tolak ukur keberhasilan akuntabilitas organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini dapat mengidentifikasi adanya deviasi kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja tahun berikutnya.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Direktorat Pengembangan Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan Tahun 2020 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

Bab I – Pendahuluan,

Dalam bab ini diuraikan mengenai gambaran umum atau profil singkat dari Direktorat Pengembangan Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan dan sekilas pengantar lainnya seperti, maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja Tahun berjalan serta sistematika penyajian laporan.

Bab II – Perencanaan Kinerja,

Dalam bab ini diuraikan beberapa hal penting dalam perencanaan kinerja, terlampir sebagai komitmen yang harus diwujudkan dalam rangka memenuhi akuntabilitas kinerja Direktorat Pengembangan Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan sebagai Unit Kerja Eselon II di lingkungan DitjenPKTrans.

Bab III – Akuntabilitas Kinerja

Dalam bab ini diuraikan pencapaian sasaran-sasaran Direktorat Pengembangan Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan, dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja sebagaimana tertuang dalam Dokumen Perjanjian Kinerja tahun berjalan.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategi tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

2. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan, penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
4. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV – Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi sertalangkah yang akan dilakukan di masa mendatang untuk meningkatkan kinerja.

Lampiran

1. Struktur Organisasi
2. Perjanjian Kinerja
3. Pengukuran Pencapaian Sasaran
4. Lain-lain

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2020 – 2024

Posisi pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024 adalah sebagai salah satu Kegiatan Prioritas dalam mendukung Prioritas Nasional 2: Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan. Hal tersebut dapat dicapai melalui pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi berdasarkan paradigma baru ketransmigrasian serta koordinasi dan integrasi dalam penyelenggaraan transmigrasi. Kini, orientasinya pada pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi yang dilakukan secara terintegrasi dengan pembangunan wilayah sehingga dapat merangsang pengembangan ekonomi wilayah yang berbasis komoditas unggulan.

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi 2020 – 2024 merupakan perencanaan jangka menengah Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun oleh Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas, fungsi, dan peran yang diamanahkan.

Secara ringkas, substansi Renstra Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi sebagai berikut:

1. Visi dan Misi

Visi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi tahun 2020 – 2024 mengacu kepada visi Presiden dan Wakil Presiden. Visi Presiden dan Wakil Presiden terpilih adalah **"Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong"**. Visi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tahun 2020 – 2024 adalah:

“Terwujudnya perdesaan yang memiliki keunggulan kolaboratif dan daya saing”. Maka, sebagai upaya dalam pencapaian visi tersebut, dirumuskan **misi** pembangunan sebagai berikut:

- a. mempercepat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat perdesaan,
- b. meningkatkan penatalaksanaan ekonomi dan investasi perdesaan,
- c. membangun dan mengembangkan kawasan transmigrasi,
- d. menyetarakan kebijakan dan program pembangunan daerah tertinggal,
- e. meningkatkan kapasitas sumber daya manusia perdesaan,
- f. membangun kolaborasi antara kawasan perdesaan dengan pusat-pusat pertumbuhan dan kawasan lainnya, dan
- g. meningkatkan penatalaksanaan pemerintahan yang baik dan bersih.

Membangun dan mengembangkan kawasan transmigrasi sebagai sebuah instrumen untuk mencapai visi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi maupun visi Presiden, tidak dapat berdiri sendiri, tapi sangat terkait dengan beberapa visi lainnya, yaitu:

- a. meningkatkan penatalaksanaan ekonomi dan investasi perdesaan,
- b. meningkatkan kapasitas sumber daya manusia perdesaan,
- c. membangun kolaborasi antara kawasan perdesaan dengan pusat-pusat pertumbuhan dan kawasan lainnya,
- d. meningkatkan penatalaksanaan pemerintahan yang baik dan bersih.

2. Tujuan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi

Tujuan yang ingin dicapai pada kurun 2020 – 2024 sesuai dengan visi dan misi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, sebagai berikut:

- a. Terwujudnya Desa Mandiri,
- b. Terwujudnya integrasi perdesaan dan perkotaan,
- c. Tumbuh dan berkembangnya investasi perdesaan,
- d. Terwujudnya kawasan transmigrasi sebagai satu kesatuan sistem pengembangan,

- e. Terentaskannya daerah tertinggal,
- f. Terwujudnya sumber daya manusia perdesaan unggul, dan
- g. Terwujudnya tata kelola yang baik dan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.

Terwujudnya kawasan transmigrasi sebagai satu kesatuan sistem pengembangan, juga diharapkan mampu untuk dapat mencapai tujuan lainnya secara simultan, yaitu:

- a. Terwujudnya Desa Mandiri;
- b. Terwujudnya integrasi perdesaan dan perkotaan;
- b. Tumbuh dan berkembangnya investasi perdesaan;
- c. Terwujudnya sumber daya manusia perdesaan unggul; dan
- d. Terwujudnya tata kelola yang baik dan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.

3. Sasaran Strategis Ketransmigrasian

Seiring berjalannya waktu jumlah Kawasan yang menjadi target berubah berdasarkan Sasaran Program RPJMN Tahun 2020 – 2024 maka sasaran strategis ketransmigrasian Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi adalah:

- a. Perkembangan rata-rata Indeks 52 Kawasan Transmigrasi, dan
- b. Perkembangan kawasan transmigrasi:
 - Meningkatnya 12 kawasan transmigrasi yang berkembang,
 - Meningkatnya 33 kawasan transmigrasi yang berkembang menjadi mandiri, dan
 - Meningkatkan 7 kawasan transmigrasi yang mandiri menjadi berdaya saing.

PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan reka tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi

amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Dengan mempertimbangkan alokasi anggaran tahun 2024, Direktorat Pengembangan Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan telah membuat perjanjian kinerja tahun 2024 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada sebagaimana dalam tabel berikut:

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Utama	Target	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Berkembangnya Satuan Permukiman Transmigrasi	1.1	Persentase SP dengan Status Penyesuaian	50	%
		1.2	Persentase SP dengan Status Pematangan	60	%
		1.3	Persentase SP dengan Status Kemandirian	45	%
		1.4	Jumlah Pusat SKP yang telah berfungsi sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan Transmigrasi skala SKP	1	Pusat SKP
		1.5	Persentase Jumlah Transmigrasi yang sudah menerima sertifikat hak milik pada tahun ke-5	60	%
		1.6	Persentase Penyelesaian Masalah Pertanahan	56	Kasus

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Utama	Target	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Transmigrasi yang difasilitasi penanganannya		
	Tersedianya Kebijakan dan Regulasi Pengembangan Satuan Permukiman	2.1	Jumlah Kebijakan dan Regulasi Pengembangan Satuan Permukiman yang ditetapkan	2	Dokumen
	Terselesaikannya tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan eksternal dan Aparat Pengawas Internal (APIP)	3.1	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal dan APIP lingkup Direktorat Pengembangan Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan yang ditindaklanjuti (Sistem Pengendalian Internal dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan)	73	%

Tabel 3.1. Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

1. Pengukuran Tingkat capaian kinerja

Pengukuran tingkat capaian kinerja tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran dengan realisasinya. Adapun target tersebut ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi tahun 2024. Kriteria ukuran keberhasilan dalam rangka pencapaian Indikator Kinerja dan Target diklasifikasikan berdasarkan metode scoring sebagai berikut:

- 1) Sangat Berhasil : > 100%
- 2) Berhasil : 80-100%
- 3) Cukup Berhasil : 60-79%
- 4) Kurang Berhasil : < 60%

Capaian kinerja Direktorat Pengembangan Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan sesuai target pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 : Target dan Capaian Kinerja Dit. PSP DAN PSKP Tahun 2024

Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Berkembang Satuan Permukiman Transmigrasi	Persentase SP dengan Status Penyesuaian	50%	50%	100%
	Persentase SP dengan Status Pemantapan	60%	60%	100%
	Persentase SP dengan Status Kemandirian	45%	45%	100%

Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Jumlah Pusat SKP yang telah berfungsi sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan Transmigrasi skala SKP	1	1	100%
	Persentase Jumlah Transmigrasi yang sudah menerima sertipikat hak milik pada tahun ke-5	60%	60%	104,7%
	Persentase Penyelesaian Masalah Pertanahan Transmigrasi yang difasilitasi penanganannya	56%	63 Kasus	112,5%
Tersedianya Kebijakan dan Regulasi Pengembangan Satuan Permukiman	Jumlah Kebijakan dan Regulasi Pengembangan Satuan Permukiman yang ditetapkan	2 Dok	5 Dok	250%
Terselesaikannya tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan eksternal dan Aparat Pengawas Internal (APIP)	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal dan APIP lingkup Direktorat Pengembangan Satuan Permukiman dan Pusat Satuan	73%	57%	57%

Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Kawasan Pengembangan yang ditindaklanjuti (Sistem Pengendalian Internal dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan)			
TOTAL				115,5%

Capaian kinerja kegiatan dan anggaran Pengembangan Satuan Permukiman, dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan sampai bulan Desember 2024 Sebesar 115,5% terdiri dari Satker Dit. PSP dan PSKP Pusat dan Satker daerah atau Realisasi Sebesar **87.08 %** terdiri dari Satker Dit. PSP dan PSKP Pusat dan Satker daerah atau Realisasi sebesar sebesar Rp. 22.773.551.307,-(dua puluh dua miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus lima puluh satu tiga ratus tujuh rupiah) dari pagu anggaran sebesar Rp. 26.153.045.000,- (dua puluh enam miliar seratus lima puluh tiga juta empat puluh lima rupiah).

Melihat dari aspek realisasi keuangannya maka persentase pencapaian sebesar 99,24 %. Pelaksanaan kegiatan yang anggarannya terkena AA konsistensi penyerapan anggaran banyak yang belum optimal. Kinerja realisasi keuangan yang baik sudah seharusnya diimbangi dengan output kegiatan yang nyata dan juga dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi perkembangan kemajuan kegiatan Pada Direktorat Pengembangan Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan.

Dengan ini disampaikan Hasil Indikator pada Direktorat Pengembangan Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan sesuai target pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. Sasaran pogram I Yaitu Berkembangnya Satuan Permukiman Transmigrasi

Berikut Lokus yang merupakan transmigrasi bina yang dibina oleh Direktorat Pengembangan Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan selama 5 tahun kemudian diserahkan kepada Pemda. Sasaran program tersebut memiliki 6 IKU dengan target 50%.

No	Provinsi	No	Kabupaten/Kota	SP/Lokasi
1	Aceh	1	Aceh Barat Daya	1. Pante Cermin
		2	Simeulue	2. Sigulai
2	Sumatera Barat	3	Sijunjung	3. Padang Tarok SP. 1
3	Bengkulu	4	Bengkulu Selatan	4. Batu Ampar
4	Sumatera Selatan	5	Ogan Komering Ilir	5. Simpang Tiga SP.5
		6	Banyuasin	6. Sri Agung
		7	Lahat	7. Keban Agung
		8	Pali	8. SP. 1 Tempirai Selatan
5	Kalimantan Barat	9	Kayong Utara	9. Tanjung Satai SP.3
		10	Sanggau	10. Sungai Beruang (SP. Pugar)
		11	Bengkayang	11. Semunying
		12	Sintang	12. Sebetung Paluk
				13. Nanga Bayan
6	Kalimantan Tengah	13	Kapuas	14. Dadahub (SumberMakmur)
		14	Lamandau	15. Kahingai (SP. Pugar)

No	Provinsi	No	Kabupaten/Kota	SP/Lokasi
7	Kalimantan Utara	15	Bulungan	16. Tanjung Buka SP. 6 Blok B
				17. Sepunggur
				18. Tanjung Buka SP. 10
8	Kalimantan Timur	16	Paser	19. Kaladen
9	Gorontalo	17	Boalemo	20. Pangea SP. 3
		18	Gorontalo	21. Bukit Aren
		19	Pohuwato	22. Sandalan
		20	Gorontalo Utara	23. Motihelumo
10	Sulawesi Tengah	21	Tojo Una-una	24. Uetangko SP.1
		22	Morowali	25. Kabera
		23	Banggai Laut	26. Dungkean
		24	Sigi	27. Bolupunto/sidera
				28. Lemban Tongoa SP.2
		25	Parigi Moutong	29. Moian
		26	Toli-toli	30. UPT. Janja
27	Poso	31. Torire		
11	Sulawesi Selatan	28	Tana Toraja	32. Supi
		29	Sidrap	33. Wala/gading
		30	Luwu Timur	34. Mahalona SKP C SP.1
		31	Wajo	35. Bekkae SP.2
12	Sulawesi Barat	32	Majene	36. Ulumanda SP. 2
		33	Mamasa	37. Rano
		34	Polewali Mandar	38. Pirian Tapiko
				39. Ratte
		35	Mamuju Tengah	40. Salundeang
41. Salulisu				

No	Provinsi	No	Kabupaten/Kota	SP/Lokasi
		36	Mamuju Utara/Pasang Kayu	42. Tanjung Cina
13	Sulawesi Tenggara	37	Muna	43. Raimuna
		38	Konawe	44. Parudongka
				45. Watutinawu
		39	Kolaka Timur	46. Tongauna
40	Muna Barat	47. Lakabu dan Momuntu		
14	Maluku Utara	41	Halmahera Timur	48. Patlean SP.5
		42	Halmahera Tengah	49. Waleh SP.3
		43	Kep. Sula	50. Mahadopi
15	Nusa Tenggara Timur	44	Alor	51. Remasingfui
		45	Belu	52. Sanabibi
				53. Peibulak
		46	Sumba Barat	54. Wemaringi
		47	Nagakeo	55. Ikiseo Gezu
		48	Sumba Timur	56. Palahonang
			Sumba Timur	57. Kotakawaw SP. 5 (Pugar)
			Sumba Timur	58. Kotakawaw SP. 7
		49	Malaka	59. Ulu Klubuk
			Malaka	60. Kapitan Meo (SDT+Pugar)
Malaka	61. Kapitan Meo (Baru)			
16	Papua	50	Keerom	62. Senggi SP.2
		51	Merauke	63. Muting SP.XII
17	Papua Barat	52	Manokwari	64. Aurmios

No	Provinsi	No	Kabupaten/Kota	SP/Lokasi
		53	Manokwari Selatan	65.Kampung Maibuki
		54	Fak-Fak	66.Tomage SP.2
		55	Teluk Wondama	67.Werianggi SP.2

a. Persentase SP dengan status penyesuaian yaitu pada tahap ini berlangsung selama 18 (delapan belas) bulan sejak penempatan Transmigran. Tahun 2024 terdapat 30 SP yang teranggarkan dan sudah terealisasi. Pada tahap ini untuk mencapai sasaran terwujudnya masyarakat yang mampu beradaptasi dengan lingkungan fisik dan lingkungan sosial dengan capaian 100%. Berikut rekapitulasi penetapan transmigran pada transmigrasi bina pada tahap penyesuaian sebagai berikut :

NO	PROVINSI	T+1		T+2	
		2024		2022	
		KK	SP	KK	SP
1	ACEH	10	0	5	0
2	SUMATERA BARAT	0	0	0	0
3	BENGKULU	11	0	0	0
4	SUMATERA SELATAN	10	0	21	1
6	KALIMANTAN TENGAH	7	0	11	0
7	KALIMANTAN UTARA	4	0	20	0
8	KALIMANTAN TIMUR	0	0	5	0
9	GORONTALO	0	0	11	0
10	SULAWESI TENGAH	25	1	25	0
11	SULAWESI SELATAN	35	0	111	0
12	SULAWESI BARAT	33	0	146	1
13	SULAWESI TENGGARA	28	0	101	0
14	NUSA TENGGARA TIMUR	20	0	58	0
15	PAPUA SELATAN	0	0	17	0

NO	PROVINSI	T+1		T+2	
		2024		2022	
		KK	SP	KK	SP
16	PAPUA BARAT	10	0	40	1
	TOTAL	193	1	571	3

b. Persentase SP dengan status pemantapan yaitu Tahap pemantapan berlangsung selama 18 (delapan belas) bulan sejak berakhirnya tahap penyesuaian. Tahun ini diberikan anggaran untuk 14 SP dan sudah terealisasi. Pada tahap ini untuk mencapai sasaran terwujudnya masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hidup dari hasil produksi yang dikembangkan dengan capaian 100%. Berikut rekapitulasi penetapan transmigran pada transmigrasi bina pada tahap pemantapan sebagai berikut:

NO	PROVINSI	T + 3		T + 4	
		2020		2019	
		KK	SP	KK	SP
1.	ACEH	0	0	50	0
2.	KALIMANTAN TENGAH	0	0	143	0
3.	KALIMANTAN UTARA	0	0	390	1
4.	GORONTALO	0	0	75	0
5.	SULAWESI TENGAH	0	0	125	0
6.	SULAWESI SELATAN	0	0	85	1
7.	SULAWESI BARAT	0	0	115	0
8.	SULAWESI TENGGARA	0	0	190	0
9.	NUSA TENGGARA TIMUR	0	0	185	3
	TOTAL	0	0	1358	5

c. Persentase SP dengan status kemandirian yaitu Tahap kemandirian berlangsung selama 2 (dua) tahun sejak berakhirnya tahap pemantapan. 61 SP dan desa terangrakan pada tahun ini dan sudah terealisasi. tahap

ini untuk mencapai sasaran terwujudnya masyarakat yang sudah terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam sistem produksi sektor unggulan dengan capaian 100%. Berikut rekapitulasi penetapan transmigran pada transmigrasi bina pada tahap kemandirian sebagai berikut :

NO	PROVINSI	T + 5		T + 6	
		2018		2017	
		KK	SP	KK	SP
1.	ACEH	189	3	0	0
2.	SUMATERA BARAT	221	1	0	0
3.	BENGKULU	25	1	0	0
4.	SUMATERA SELATAN	0	0	0	0
5.	KALIMANTAN BARAT	191	3	0	0
6.	KALIMANTAN TENGAH	25	1	0	0
7.	KALIMANTAN UTARA	550	2	0	0
8.	KALIMANTAN TIMUR	40	1	0	0
9.	GORONTALO	365	3	0	0
10.	SULAWESI TENGAH	205	4	0	0
11.	SULAWESI SELATAN	65	2	0	0
12.	SULAWESI BARAT	305	4	0	0
13.	SULAWESI TENGGARA	90	3	0	0
14.	NUSA TENGGARA TIMUR	105	4	0	0
15.	PAPUA SELATAN	175	0	0	0
16.	PAPUA BARAT	190	4	0	0
	TOTAL	2741	36	0	0

d. Persentase jumlah transmigran yang sudah menerima sertipikat hak milik pada tahun ke-5

Target IKU Persentase jumlah transmigran yang sudah menerima sertipikat hak milik pada tahun ke-5 yaitu sebesar 60%. Jumlah transmigran pada tahun ke-5 sebanyak 1.925 transmigran, dengan

Realisasi sebanyak 1.202 transmigran sehingga persentasenya mencapai sebesar 104,70%. (sudah memenuhi target yang ada yaitu 60%)

e. Jumlah Pusat SKP yang telah berfungsi sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan Transmigrasi skala SKP. Pusat SKP yang telah berfungsi yaitu di Barito Kuala, Desa Danda Jaya, pada tahun ini telah dilaksanakan pekerjaan Peningkatan Jalan dengan capaian 100%.

f. Persentase Penyelesaian Masalah Pertanahan Transmigrasi yang difasilitasi penanganannya Data permasalahan pertanahan transmigrasi saat ini sejumlah 295 Kasus, yang sudah terfasilitasi sejumlah 63 kasus (sudah memenuhi target yang ada yaitu 56 kasus) dengan capaian 108,9%

No	PROVINSI / LOKASI
1.	Prov. Sumatera Utara
1	Eks UPT. Habinsaran/ Janji Maria Kab. Toba Samosir
2	Eks UPT. Sikara-kara Kab. Mandailing Natal
3	UPT Singkuang SP.1 Kab. Mandailing Natal
4	UPT Singkuang SP.2 Kab. Mandailing Natal
5	Eks UPT Batahan III Kab. Mandailing Natal
6	UPT Desa Simpang Bolon Kab. Tapanuli Utara
7	UPT. Pulau Pakat Sp.2 Kab. Tapanuli Tengah
8	UPT Ujung Batu SP.5 Kab. Padang Lawas
9	UPT. Bagan Toreh Kab. Labuhan Batu Selatan
10	UPT Sibagindar SP.3 Kab. Pakpak Bharat
11	Eks. Sie Lapan Desa Bukit Mas II Kab. Langkat
2.	Prov. Bengkulu
12	UPT. Malakoni Kab. Bengkulu Utara
13	UPT. Tanjung Aur II Kab. Bengkulu Selatan
3.	Prov. Kepulauan Bangka Belitung
14	UPT. Rejomulyo/Membalong Kab. Belitung
4.	Prov. Jambi

No	PROVINSI / LOKASI	
	15	UPT. Rantau Pandan Kab. Bungo
	16	UPT. Sungai Bermas Kab. Kerinci
5.	Prov. Sumatera Selatan	
	17	UPT. Perambahan SP.I Kab. Banyuasin
	18	UPT. Air Tenggulang Kab. Musi Banyuasin
6.	Prov. Kalimantan Barat	
	19	UPT. Pangmilang SP.I dan SP. II Kota Singkawang
	20	UPT. Parit Haji Ali Kab. Kubu Raya
7.	Prov. Kalimantan Selatan	
	21	UPT. Belimbing Lama Kab. Banjar
	22	UPT. Hakim S Pinang Kab. Banjar
8.	Prov. Kalimantan Timur	
	23	UPT. Tepian Langsung SP. VIII Kab. Kutai Timur
6.	Prov. Kalimantan Barat	
	19	UPT. Pangmilang SP.I dan SP. II Kota Singkawang
	20	UPT. Parit Haji Ali Kab. Kubu Raya
7.	Prov. Kalimantan Selatan	
	21	UPT. Belimbing Lama Kab. Banjar
	22	UPT. Hakim S Pinang Kab. Banjar
8.	Prov. Kalimantan Timur	
	23	UPT. Tepian Langsung SP. VIII Kab. Kutai Timur
	24	UPT. Sukan Tengah SP. III Kab. Berau
9.	Prov. Sulawesi Tengah	
	25	UPT. Padauloyo Kab. Tojo Una Una
	26	UPT. Wosu SP. II Desa bahoea Kab. Morowali
10.	Prov. Sulawesi Selatan	
	27	UPT. Punaga SP. I dan SP. II Kab. Takalar
11.	Prov. Sulawesi Tenggara	
	28	UPT. Tolihe Kab. Konawe Selatan
	29	UPT. Pohorua/Ds. Pohorua Kab. Muna

No	PROVINSI / LOKASI
12.	Prov. Nusa Tenggara Barat
30	UPT. Sori Panihi SP. 5 Kab. Bima
31	UPT. Jeringo Kab. Lombok Timur
13.	Prov. Nusa Tenggara Timur
32	UPT. Lebewala SP.2 Kab. Lembata
14.	Prov. Maluku
33	UPT. Air Matakabo D5 Kab. Seram Bagian Timur

b. Sasaran Program II yaitu Tersedianya kebijakan dan regulasi Pengembangan

Jumlah kebijakan dan regulasi Pengembangan Satuan Permukiman yang ditetapkan dengan:

1. Kepmen tentang Strategi Percepatan Penyelesaian Permasalahan pertanahan Transmigrasi Nomor 195 Tahun 2024;
2. Kepmen tentang Tim Percepatan Penyelesaian Permasalahan Pertanahan Transmigrasi Nomor 192 Tahun 2024;
3. Rapermen tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengembangan Satuan Permukiman Kawasan Transmigrasi;
4. Petunjuk teknis Pelaksanaan Pengukuran dan Pembagian Lahan transmigrasi;
5. Draft Reviu Permenakertrans Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengurusan hak Atas Tanah Transmigrasi;

c. Sasaran program II yaitu terselesaikannya tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan eksternal dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dengan Persentase rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal dan APIP lingkup Direktorat Pengembangan Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan. yang ditindaklanjuti (Sistem Pengendalian Internal dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan) dengan ini Masih dikoordinasikan kepada pihak-pihak yang terlibat dengan mengedepankan komitmen dalam pembayaran temuan tersebut dengan capaian 57%.

A. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Tahun 2024 berarti merupakan tahun keempat berjalannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2020-2024. Idealnya, capaian kinerja tahun 2024 dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2022 dalam mengukur peningkatan kinerja pada satu kerangka waktu yang dapat dijadikan sebagai acuan.

Indikator Kinerja Utama	Capaian 2022	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2024	Pagu	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Persentase SP dengan Status Penyesuaian	100%	Persentase SP dengan Status Penyesuaian	100%	3,844,250,000	3,570,152,715
Persentase SP dengan Status Pemantapan	100%	Persentase SP dengan Status Pemantapan	100%	6,927,939,000	6,003,436,447
Persentase SP dengan Status Kemandirian	100%	Persentase SP dengan Status Kemandirian	100%	9,241,384,000	7,306,575,552
		Jumlah Pusat SKP yang telah berfungsi sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan	100%	924,550,000	923,891,000

Indikator Kinerja Utama	Capaian 2022	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2024	Pagu	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Transmigrasi skala SKP			
Persentase Jumlah Transmigrasi yang sudah menerima SERTIPIKAT HAK MILIK pada tahun ke-5	100%	Persentase Jumlah Transmigrasi yang sudah menerima SERTIPIKAT HAK MILIK pada tahun ke-5	104,7%	2,457,745,000	2,407,747,403
		Persentase Penyelesaian Masalah Pertanahan Transmigrasi yang difasilitasi penanganannya	112,5%	2,099,277,000	1,927,546,655
Jumlah Kebijakan dan Regulasi Pengembangan Satuan	20%	Jumlah Kebijakan dan Regulasi Pengembangan Satuan Permukiman yang	250%	657,900,000	634,201,535

Indikator Kinerja Utama	Capaian 2022	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2024	Pagu	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Permukiman yang ditetapkan		ditetapkan			
Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal dan APIP lingkup Direktorat Pengembangan Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan yang ditindaklanjuti (Sistem Pengendalian Internal dan Kepatuhan terhadap	13%	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal dan APIP lingkup Direktorat Pengembangan Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan yang ditindaklanjuti (Sistem Pengendalian Internal dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan)	57%	-	-

Indikator Kinerja Utama	Capaian 2022	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2024	Pagu	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Peraturan Perundang-Undangan)					
TOTAL 2022	72%	TOTAL 2024	115,5%	26,153,045,000	22,773,551,307

Dilihat dari perbandingan capaian 2022 dan 2024 maka terjadi kenaikan capaian kinerja. Capaian yang ada pada laporan kinerja 2022 untuk IKU I yaitu nilai Jumlah Kebijakan dan Regulasi Pengembangan Satuan Permukiman yang ditetapkan hanya mencapai 20%, yang telah menargetkan 5 dokumen tetapi hanya terealisasi 1 dokumen yaitu Pedoman program penjarangan siswa berprestasi di Kawasan transmigrasi , untuk di Tahun 2024 terealisasi sebanyak 5 dokumen Kebijakan dan Regulasi Pengembangan Satuan Permukiman yaitu Kepmen tentang Strategi Percepatan Penyelesaian Permasalahan pertanahan Transmigrasi Nomor 195 Tahun 2024; Kepmen tentang Tim Percepatan Penyelesaian Permasalahan Pertanahan Transmigrasi Nomor 192 Tahun 2024; Rapermen tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengembagn Satuan Permukiman Kawasan Transmigrasi; Petunjuk teknis Pelaksanaan Pengukuran dan Pembagian Lahan transmigrasi; Draft Reviu Permenakertrans Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengurusan hak Atas Tanah Transmigrasi;

B. Analisis Keberhasilan/Kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Dalam pelaksanaan program/kegiatan Direktorat Pengembangan Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan, tidak dapat dipungkiri terdapat faktor pendukung keberhasilan pencapaian kinerja berdasarkan sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Apabila ditinjau dari sejumlah aspek capaian

kinerja dapat dilihat dari indikator utama Direktorat Pengembangan Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan. Namun apabila ditinjau dari pelaksanaan program/kegiatan yang dapat di implementasikan, Direktorat Pengembangan Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan mengalami pencapaian/kegagalan penurunan kinerja. Masing-masing penyebab faktor kegagalan dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Penyebab keberhasilan:

1. Dapat memimplementasikan tugas dan fungsi dengan baik dalam melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data serta pelaksanaan evaluasi dan penyusunan dibahas melalui rapat internal;
2. Adanya Koordinasi dan kerjasama yang baik dengan unit kerja, pelaksanaan kegiatan baik realisasi anggaran maupun fisik dapat dilaksanakan secara optimal karena proses telah dilaksanakan melalui perencanaan yang baik dan terstruktur;
3. Pemanfaatan media informasi seperti melalui aplikasi Whatsap dan zoom meeting lebih meningkatkan komunikasi antara Pelaksana kegiatan;
4. Adanya program luncuran yang menjadi salah satu inovasi yang dilakukan oleh Direktorat Fasilitas Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi yang sangat mendukung target penempatan.

B. Penyebab Penghambat:

1. Revisi DIPA Ditjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi belum optimal, sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan riviui;
2. Adanya AA yang mengakibatkan tertundanya kegiatan dipusat dan daerah;
3. Pada tahap penyelesaian, pemantapan dan kemandirian belum menjelaskan kriteria untuk mencapai tahapan tersebut sesuai dengan cara perhitungan dan devinisi operasional pada IKU yang telah ditetapkan.
4. Data dan informasi sebagai bahan pelaksanaan kegiatan bersumber

dari direktorat UKE lainnya diantaranya Direktorat Fasilitas Penataan Pesebaran Penduduk terkait dengan penempatan transmigrasi yang belum pasti jumlahnya;

5. Data dan informasi sebagai bahan pelaporan pada Direktorat Pengembangan Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan bersumber dari Satker Daerah tidak tepat waktu sehingga data dan informasi yang disampaikan tidak valid.
 6. Terdapat perbedaan IKU antara Renstra, Lapkin dan Perkin sehingga tujuan/sasaran dalam laporan kinerja tidak selaras dengan rencana strategis;
- C. Alternatif Solusi yang telah dilakukan:
1. Percepatan pelaksanaan kegiatan setelah dilaksanakan Revisi DIPA dan pembukaan AA;
 2. Adanya riviui sesuai dengan usulan surat dari Setditjen PPKTrans kepada Kepala Biro Perencanaan Nomor:298/PR-00.002/III/2021 tanggal 5 maret 2021 tentang usulan revisi IKU UK 2 Direktorat Jenderal Pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi tahun 2021 – 2024;
 3. Perlu adanya penguatan kordinasi dengan Satker daerah dan UKE 2 lainnya;
 4. Terdapat perbedaan IKU antara Renstra, Lapkin dan Perkin karena blm adanya riviui Renstra karena renstra ditjen baru selesai dibulan desember, dan Direktorat Pengembangan Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan sudah meriviui IKU pada kepmen no. 2 tahun 2024. terdapat adanya perubahan target satuan perkin dan IKU yaitu pada sasaran persentase penyelesaian masalah pertanahan transmigrasi yg di fasilitasi penanganannya. dikarenakan perhitungan lebih konfersikan menjadi jumlah kasus.

Telah dikemukakan pada bab sebelumnya tentang target dan realisasi kinerja Direktorat Pengembangan Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan tahun 2024. Secara keseluruhan, kinerja Direktorat Pengembangan Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan

Pengembangan tahun 2024 termasuk klasifikasi sangat berhasil dengan capaian rerata sebesar 85.05%.

Beban tugas Direktorat Pengembangan Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan meliputi peningkatan / rehabilitasi sarana, prasarana, serta fasilitas umum permukiman dan kawasan transmigrasi; fasilitasi pengurusan SERTIPIKAT HAK MILIK, serta penyelesaian permasalahan pertanahan; layanan sosial budaya dan kelembagaan; bantuan sarana produksi pertanian. Capaian output kegiatan dari masing-masing direktorat pada tahun 2024 dapat kami sampaikan melalui infografis sebagai berikut.



Faktor keberhasilan nilai capaian kinerja Direktorat Pengembangan Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan pada tahun 2024 melalui strategi yang dilaksanakan sebagai berikut:

Adanya strategi percepatan proses pengadaan barang dan jasa pada awal

tahun anggaran 2024 melalui surat edaran Ditjen PPKTrans Nomor 18/PBJ.02.01/I/2024 tanggal 6 Januari 2024, serta melaksanakan kegiatan bantuan teknis penyiapan dokumen-dokumen pengadaan pada satker yang kekurangan SDM teknis yang kompeten

Kolaborasi dan koordinasi yang baik antara pusat dan daerah. Dukungan dan komitmen dari 74 Satker daerah penerima anggaran Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi pada Direktorat Pengembangan Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan dalam penyelenggaraan Pembangunan dan pengembangan Kawasan transmigrasi sangat membantu dalam pencapaian target kinerja.

Transmigrasi didukung oleh dasar hukum yang cukup kuat, dari Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, Peraturan Pemerintah RI Nomor 3 Tahun 2014, hingga Peraturan Presiden No. 50 thn 2018, ttg kordinasi dan integrasi penyelenggaraan transmigrasi. Pelaksanaan transmigrasi yang sudah berjalan lama dan sesuai dengan aturan yang ada sudah cukup matang. Yang terakhir melalui imolementasi Perpres 50/2018 terdapat intervensi program di Kawasan Transmigrasi oleh pihak lain K/L/D/M. Walaupun belum cukup maksimal, efek dari kuatnya peraturan yang memayungi bidang ketransmigrasian bisa dirasakan terlihat dari intevensi yang dilakukan oleh K/L/D/M mampu meningkatkan nilai indikator penilaian Kawasan seperti dimensi ekonomi dan sarana dan prasarana.

Berdasarkan apa yang telah dicapai sampai dengan tahun 2024 maka dengan capaian yang baik, berdasarkan capaian kinerja dan realisasi keuangan yang ada, ada beberapa permasalahan yang dihadapi dalam realisasi kegiatan dan anggaran adalah sebagai berikut:

Tren anggaran untuk program transmigrasi yang terus menurun setiaptahunnya, padahal Animo Transmigrasi cukup besar (5.701 KK pada tahun 2024), sementara Program penempatan transmigrasi yang kecil (rata-rata 200 KK/tahun);

Implementasi Perpres 50 Tahun 2018 tentang koordinasi dan intergrasi pelaksanaan transmigrasi belum maksimal. Dibutuhkan optimalisasi Tim KIPT

Perpres 50/2018 Pusat dan Daerah untuk berfokus intervensi pada kawasan transmigrasi yang belum berstatus berdaya saing. Hingga saat ini dari target 7 kawasan transmigrasi berdaya saing baru tercapai 3 kawasan transmigrasi berdaya saing, dibutuhkan 4 tahun untuk bisa mewujudkan hal tersebut;

- a) Seringnya terjadi perubahan KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) pada Satuan Kerja di Daerah yang menghambat realisasi pekerjaan, karena dalam prosesnya membutuhkan waktu yang cukup lama;
- b) Akibat blokir Automatic Pada tahun 2024 terjadi penurunan angka target akibat batal diadakan penempatan transmigran baru, yang semula sebanyak 207 KK turun menjadi 193 KK yang berimbas pada program yang lainnya: pemenuhan mandatory T+1 seperti seperti: ukur bagi lahan, Sarana Produksi Pertanian A ikut turun.

C. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Apabila dilakukan perbandingan realisasi anggaran dengan pencapaian kinerja dapat terlihat dari capaian nilai aplikasi SMART. Melalui system tersebut ke 74 Direktorat Pengembangan Satuan Permukiman, dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan baik satker pusat maupun daerah mengisi hasil kinerjanya secara berkala. Hingga pada akhirnya diperoleh hasil nilai capaian sasaran program, capaian output program, serta penyerapan anggaran keseluruhan berada pada nilai diatas 99 sehingga jika dibandingkan maka terdapat nilai efisiensi sebesar 2.24 dimana hal tersebut menandakan bahwa dengan belanja anggaran yang telah dikeluarkan terjadi keefisienan dengan hasil capaian yang diperoleh. Namun perolehan nilai kinerja pada aplikasi SMART mengalami kendala karena jumlah satker yang berkewajiban mengisi pelaporan emonev ini cukup banyak, sedangkan cara pengisian berubah pada tahun anggaran 2024. Kendala ini menjadikan nilai rata-rata satker pada Di Direktorat Pengembangan Satuan Permukiman, dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan kurang maksimal

2. REALISASI ANGGARAN

Realisasi kegiatan Direktorat Pengembangan Satuan Permukiman, dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan sampai dengan akhir bulan Januari - Desember

2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

Gambar 3.3 Realisasi Anggaran Pusat dan Daerah Tahun 2024

PAGU ALOKASI

Rp. 26.156.945.000

40,71 %

PUSAT

Direktorat PSP & PSKP

Rp. 10.645.282.000

59,29 %

DAERAH

Satker Daerah

Rp. 15.507.763.000

Dari uraian di atas terlihat bahwa pencapaian realisasi keuangan pada Direktorat Pengembangan Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan di Pusat dan Daerah mencapai 87.08 %. Melihat dari aspek realisasi keuangannya maka kinerja ini dinilai baik. Kinerja realisasi keuangan yang baik sudah seharusnya diimbangi dengan output kegiatan yang nyata dan juga dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi perkembangan kemajuan kegiatan Pengembangan Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan.

Gambar 5 Kronologi AA

BAB IV PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT TAHUN 2024

Permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan Pengembangan Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan Tahun 2024 sebagai berikut:

Permasalahan	Tindak Lanjut
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Adanya automatic adjustment/blokir kegiatan dan buka blokir yang menyebabkan terlambatnya pelaksanaan pengadaan barang dan jasa serta proses pelaksanaan pekerjaan, sehingga kurang optimalnya penyerapan anggaran dan progress fisik kegiatan tiap bulan. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Percepatan proses lelang pengadaan barang dan jasa.
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sulitnya aksesibilitas menuju lokasi pekerjaan, sehingga terhambatnya mobilisasi peralatan dan material ke lokasi pekerjaan. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Penambahan tenaga kerja, waktu pelaksanaan pekerjaan, dan penyesuaian metode pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan sehingga target pelaksanaan pekerjaan dapat tercapai.
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Anggaran kegiatan di Satker Daerah yang pada awalnya masih dibintang/blokir oleh Ditjen. Anggaran (Kemenkeu), sampai bulan November 2024 sebagian baru dibuka blokir sehingga sebagian kegiatan per Desember masih proses lelang. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pencermatan kembali terhadap anggaran dan kegiatan sesuai dengan kondisi di lokasi.

Permasalahan	Tindak Lanjut
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa baru dapat diinput di aplikasi SIRUP pada akhir bulan Maret/awal bulan April. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Meningkatkan monitoring progres lelang barang dan jasa satker daerah.
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Tidak optimalnya koordinasi antara Dinas yang membidangi Ketransmigrasian Provinsi, Kabupaten/ Kota dan pihak terkait dalam pelaksanaan rapat fasilitasi 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Optimalisasi koordinasi antar Dinas Dinas yang membidangi Ketransmigrasian Provinsi, Kabupaten/Kota, beserta pihak terkait
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kurangnya informasi, data dan dokumen pertanahan transmigrasi untuk lokasi transmigrasi lama yang sudah menjadi desa definitif 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Diperlukan optimalisasi koordinasi dengan pihak terkait ➤ Perlu adanya pembenahan arsip terkait ketransmigrasian
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Keterbatasan SDM aparatur di Daerah yang mengetahui yang memahami kebijakan ketransmigrasian khususnya dibidang pertanahan karena sering terjadinya pergantian pejabat yang membidangi ketransmigrasian 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Perlu adanya sosialisasi dan bimbingan teknis terkait kebijakan ketransmigrasian khususnya dibidang pertanahan
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Belum optimalnya peran Gugus Tugas Reforma Agraria dalam menangani Permasalahan Pertanahan Transmigrasi di Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Perlu optimalisasi peran GTRA di daerah dalam penanganan penyelesaian permasalahan pertanahan ketransmigrasian guna mempercepat penerbitan SERTIPIKAT HAK MILIK

Tabel 3.4 Permasalahan dan Tindak Lanjut Tahun 2024

BAB V PENUTUP

KESIMPULAN

1. Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktorat Pengembangan Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan telah berlandaskan sasaran program, indikator kinerja dan target sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja tahun 2024.
2. Laporan Kinerja Direktorat Pengembangan Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan tahun 2024 telah menyajikan Berbagai keberhasilan dan kegagalan serta permasalahan dalam rangka pencapaian kinerjanya.
3. Total capaian kinerja Direktorat Pengembangan Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan tahun 2024 adalah 115,5%, sedangkan realisasi anggaran dalam rangka pencapaian kinerja tersebut adalah Sebesar 87.08 % terdiri dari Satker Dit. PSP dan PSKP Pusat dan Satker daerah atau Realisasi sebesar Rp. 22.773.551.307,-(dua puluh dua miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus lima puluh satu tiga ratus tujuh rupiah) dari pagu anggaran sebesar Rp. 26.153.045.000,- (dua puluh enam miliar seratus lima puluh tiga juta empat puluh lima rupiah).
4. Berdasarkan metode scoring yang telah ditetapkan, dengan total capaian kinerja sebesar 100% lebih, masuk dalam kategori SB.

SARAN

Pencapaian kinerja kegiatan-kegiatan yang mendukung program tidak selalu dapat tergambarkan dalam keberhasilan atau kegagalan pencapaian indikator sasaran, karena masih dipengaruhi oleh pencapaian kinerja program lain. Satu program dapat ditujukan untuk pencapaian sasaran lebih dari satu, demikian juga sebaliknya.

Dilihat dari pengukuran kinerja dapat dikatakan bahwa pelaksanaan kinerja adalah berhasil. Namun demikian keberhasilan itu akan lebih meningkat apabila koordinasi dan jejaringan yang kolaborasi dengan kementerian/ lembaga lintas sektor sangat membantu dalam upaya kerja sama dengan pemerintah/badan usaha yang ada.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Pengembangan Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan Tahun 2024 disajikan sebagai informasi pencapaian kinerja Direktorat Pengembangan Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan pada Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Jakarta, Januari 2024

Direktur
Pengembangan Satuan Permukiman dan
Pusat Satuan Kawasan Pengembangan,

Rully Rachman, S.H., M.H
NIP. 19740403 200112 1 001

LOKASI KEGIATAN DAN ANGGARAN PUSAT DAERAH TAHUN 2024

NO	SP	KABUPATEN	PROVINSI	KEGIATAN	Rp	Penempatan Tahun	TAHAP PERKEMBANGAN SP										REALISASI Rp	% Rp	% Fisik	CAPAIAN OUTPUT			
							Tahap Penyesuaian		Tahap Pemantapan		Tahap kemandirian		Cek list	REALISASI Rp	% Rp	% Fisik					CAPAIAN OUTPUT		
							Cek list	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	Cek list	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)										Cek list	Rencana (Rp)
1	Sigulai	SIMEULUE	ACEH	Operasional Pendidikan	27,000,000	2016	√	27,000,000	27,000,000				√	27,000,000	100.00%								
				Insentif Kesehatan	12,000,000		√	12,000,000	12,000,000			√	12,000,000	100.00%									
				Operasional Kesehatan	3,600,000		√	3,600,000	3,600,000			√	3,600,000	100.00%									
				Perdin Kesehatan	1,480,000		√	1,480,000	1,480,000			√	1,480,000	100.00%									
				Pembinaan Mental Spiritual	7,200,000		√	7,200,000	7,200,000			√	7,200,000	100.00%									
				Rujukan Pasien & Obat-obatan	19,400,000		√	19,400,000	19,400,000			√	19,400,000	100.00%									
				Bantuan Perlungkangan PUSTU	20,000,000			20,000,000	-														
				Fasilitasi Penumbuhan/Pembentukan Poktan/Gapoktan	22,500,000		√	22,500,000	22,500,000							√	22,500,000	100.00%					
				Operasional Pengelola Permukiman Transmigrasi	19,000,000								√	19,000,000	19,000,000	√	19,000,000	100.00%					
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Desa	3,600,000								√	3,600,000	3,600,000	√	3,600,000	100.00%					
				Pengendalian dan Monitoring Pengadaan Saprotan (Provinsi)	5,560,000						√	5,560,000	5,560,000				√	5,560,000	100.00%				
				2	Sumber Makmur		KAPUAS	KALIMANTAN TENGAH	Operasional Pendidikan	27,000,000	2021												
Insentif Kesehatan	12,000,000	√	12,000,000			12,000,000						√	12,000,000	100.00%									
Operasional Kesehatan	3,600,000																						
Perdin Kesehatan	2,680,000																						
Pembinaan Mental Spiritual	7,200,000	√	7,200,000			7,200,000						√	7,200,000	7,200,000	√	7,200,000	100.00%						
Rujukan Pasien & Obat-obatan	14,710,000																						
Operasional Pengelola Permukiman Transmigrasi	19,000,000	√	19,000,000			18,800,000											18,800,000	98.95%					
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Desa	3,600,000	√	3,600,000			3,600,000											3,600,000	100.00%					
Pengadaan Sarana Produksi	150,000,000	√	150,000,000			-												-	0.00%				
Rapat pembinaan dan pengembangan usaha SP Bina 2024	2,200,000		2,200,000			-												-	0.00%				
3	Ti. Buka Sp. 10	BULUNGAN	KALIMANTAN UTARA			Operasional Pendidikan			27,000,000	2019		√	27,000,000	27,000,000				√	27,000,000	100.00%			
						Insentif Kesehatan			10,400,000			√	10,400,000	10,400,000			√	10,400,000	100.00%				
				Operasional Kesehatan	3,600,000	√	3,600,000	3,600,000				√	3,600,000	100.00%									
				Perdin Kesehatan	1,740,000	√	1,740,000	1,740,000				√	1,740,000	100.00%									
				Pembinaan Mental Spiritual	7,200,000	√	7,200,000	7,200,000				√	7,200,000	7,200,000	√	7,200,000	100.00%						
				Rujukan Pasien & Obat-obatan (173)	19,610,000	√	19,610,000	19,610,000				√	19,610,000	19,610,000	√	19,610,000	100.00%						
				Fasilitasi Penumbuhan/Pembentukan Poktan/Gapoktan	22,500,000	√	22,500,000	22,500,000								√	22,500,000	100.00%					
				Operasional Pengelola Permukiman Transmigrasi	20,600,000											√	20,600,000	100.00%					
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Desa	3,600,000											√	3,600,000	100.00%					
				Pengendalian dan Monitoring Pengadaan Saprotan (Provinsi)	7,230,000	√	7,230,000	7,230,000								√	7,230,000	100.00%					
				4	Kaladen	PASER	KALIMANTAN TIMUR	Operasional Pendidikan	27,000,000		2018												
								Insentif Kesehatan	12,000,000			√	12,000,000	12,000,000			√	12,000,000	100.00%				
Operasional Kesehatan	3,600,000	√	3,600,000					-				√	-	0.00%									
Perdin Kesehatan	1,690,000	√	1,690,000					-				√	-	0.00%									
Pembinaan Mental Spiritual	7,200,000	√	7,200,000					7,200,000				√	7,200,000	7,200,000	√	7,200,000	100.00%						
Rujukan Pasien & Obat-obatan	11,350,000	√	11,350,000					3,849,000				√	3,849,000	33.91%									
Bantuan Perlungkangan PUSTU	20,000,000																						
Operasional Pengelola Permukiman Transmigrasi	19,000,000															√	19,000,000	100.00%					
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Desa	3,600,000															√	3,600,000	100.00%					
Pengendalian dan Monitoring Pengadaan Saprotan (Provinsi)	7,180,000	√	7,180,000					7,090,000								√	7,090,000	98.75%					
5	Uetangko Sp.1	TOIO UNA UNA	SULAWESI TENGAH					Operasional Pendidikan	39,000,000	2021													
								Insentif Kesehatan	12,000,000			√	12,000,000	12,000,000			√	12,000,000	100.00%				
				Operasional Kesehatan	3,600,000	√	3,600,000	3,600,000				√	3,600,000	100.00%									
				Perdin Kesehatan	1,510,000	√	1,510,000	-				√	-	0.00%									
				Pembinaan Mental Spiritual	7,200,000	√	7,200,000	7,200,000				√	7,200,000	7,200,000	√	7,200,000	100.00%						
				Rujukan Pasien & Obat-obatan	8,060,000	√	8,060,000	8,060,000				√	8,060,000	8,060,000	√	8,060,000	100.00%						
				Bantuan Perlungkangan PUSTU	20,000,000																		
				Operasional Pengelola Permukiman Transmigrasi	19,000,000	√	19,000,000	19,000,000								√	19,000,000	100.00%					
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Desa	3,600,000	√	3,600,000	3,600,000								√	3,600,000	100.00%					
				Pengendalian dan Monitoring Pengadaan Saprotan (Provinsi)	6,620,000	√	6,620,000	6,620,000									6,620,000	100.00%					
				6	Lemban Tongoa Sp.2	SIGI	SULAWESI TENGAH	Operasional Pendidikan	39,000,000		2016												
								Insentif Kesehatan	12,000,000			√	12,000,000	12,000,000			√	12,000,000	100.00%				
Operasional Kesehatan	3,600,000	√	3,600,000					3,600,000				√	3,600,000	100.00%									
Perdin Kesehatan	1,460,000	√	1,460,000					1,350,000				√	1,350,000	92.47%									
Pembinaan Mental Spiritual	7,200,000	√	7,200,000					7,200,000				√	7,200,000	7,200,000	√	7,200,000	100.00%						

NO	SP	KABUPATEN	PROVINSI	KEGIATAN	Rp	Penempatan Tahun	TAHAP PERKEMBANGAN SP								REALISASI Rp	% Rp	% Fisik	CAPAIAN OUTPUT	
							Tahap Penyesuaian			Tahap Pematapan			Tahap kemandirian						
							Cek list	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	Cek list	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	Cek list	Rencana (Rp)					Realisasi (Rp)
				Rujukan Pasien & Obat-obatan (165)	16,775,000		√	16,775,000	16,473,500		√	16,473,500	98.20%						
				Operasional Pengelola Permukiman Transmigrasi	19,000,000						√	19,000,000	100.00%						
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Desa	3,600,000						√	3,600,000	100.00%						
				Pengendalian dan Monitoring Pengadaan Saprotan (Provinsi)	6,620,000			6,620,000	6,330,000			√	6,330,000	95.62%					
				Pengendalian dan Monitoring Pengadaan Saprotan (Kabupaten)	900,000		√	900,000	900,000			√	900,000	100.00%					
				Pengadaan Sarana Produksi Penempatan Tahun Ke 3 (T3)	57,750,000		√	57,750,000	57,600,000			√	57,600,000	99.74%					
				Rapat pembinaan dan pengembangan usaha SP Bina 2024	3,400,000		√	3,400,000	3,386,000			√	3,386,000	99.59%					
				Peningkatan SAB di SP Boluuntu/Sidera	99,000,000	T+6					√	99,000,000	99,000,000	100.00%	100%	1 unit			
7	Mahalona Skp C.Sp. 1	LUWU TIMUR	SULAWESI SELATAN	Operasional Pendidikan	33,000,000	2018	√	33,000,000	33,000,000			√	33,000,000	100.00%					
				Insentif Kesehatan	12,000,000		√	12,000,000	12,000,000			√	12,000,000	100.00%					
				Operasional Kesehatan	3,600,000		√	3,600,000	3,600,000			√	3,600,000	100.00%					
				Perdin Kesehatan	1,640,000		√	1,640,000	1,390,000			√	1,390,000	84.76%					
				Pembinaan Mental Spiritual	7,200,000		√	7,200,000	7,200,000			√	7,200,000	100.00%					
				Rujukan Pasien & Obat-obatan	13,660,000		√	13,660,000	13,660,000			√	13,660,000	100.00%					
				Bantuan Perlengkapan PUSTU	20,000,000									0.00%		blokir			
				Facilitasi Penuhmbuhan/Pembentukan Poktan (Gapoktan)	22,500,000		√	22,500,000	21,500,000			√	21,500,000	95.56%					
				Operasional Pengelola Permukiman Transmigrasi	19,000,000						√	19,000,000	19,000,000	100.00%					
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Desa	3,600,000						√	3,600,000	3,600,000	100.00%					
				Pengendalian dan Monitoring Pengadaan Saprotan (Provinsi)	6,380,000		√	6,380,000	6,380,000			√	6,380,000	100.00%					
				Pengendalian dan Monitoring Pengadaan Saprotan (Kabupaten)	1,340,000		√	1,340,000	1,340,000			√	1,340,000	100.00%					
				Pengadaan Sarana Produksi Penempatan Tahun Ke 1 (T1)	58,500,000		√	58,500,000	57,986,595			√	57,986,595	99.12%					
				Pengadaan Sarana Produksi Penempatan Tahun ke 2 (T2)	102,750,000		√	102,750,000	84,717,600			√	84,717,600	82.45%					
				Pengadaan Sarana Produksi Penempatan Tahun ke 3 (T3)	354,200,000		√	354,200,000	343,252,000			√	343,252,000	96.91%					
				Rapat pembinaan dan pengembangan usaha SP Bina 2024	2,600,000		√	2,600,000	2,530,000			√	2,530,000	97.31%					
8	Bekkae Sp. 2	WAJO	SULAWESI SELATAN	Operasional Pendidikan	45,000,000	2019	√	45,000,000	45,000,000			√	45,000,000	100.00%					
				Insentif Kesehatan	12,000,000		√	12,000,000	12,000,000			√	12,000,000	100.00%					
				Operasional Kesehatan	3,600,000		√	3,600,000	3,600,000			√	3,600,000	100.00%					
				Perdin Kesehatan	1,516,000		√	1,516,000	1,516,000			√	1,516,000	100.00%					
				Pembinaan Mental Spiritual	7,200,000		√	7,200,000	7,200,000			√	7,200,000	100.00%					
				Rujukan Pasien & Obat-obatan	13,170,000		√	13,170,000	13,170,000			√	13,170,000	100.00%					
				Operasional Pengelola Permukiman Transmigrasi	19,000,000						√	19,000,000	19,000,000	100.00%					
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Desa	3,600,000						√	3,600,000	3,600,000	100.00%					
				Pengendalian dan Monitoring Pengadaan Saprotan (Provinsi)	6,380,000			6,380,000	4,640,000			√	4,640,000	72.73%					
				Pengendalian dan Monitoring Pengadaan Saprotan (Kabupaten)	940,000		√	940,000	940,000			√	940,000	100.00%					
				Pengadaan Sarana Produksi Penempatan Tahun ke 3 (T3)	73,150,000		√	73,150,000	73,150,000			√	73,150,000	100.00%					
				Rapat pembinaan dan pengembangan usaha SP Bina 2024	2,600,000			2,600,000	-			√	-	0.00%					
9	Rano	MAMASA	SULAWESI BARAT	Operasional Pendidikan	27,000,000	2016	√	27,000,000	27,000,000			√	27,000,000	100.00%					
				Insentif Kesehatan	12,000,000		√	12,000,000	12,000,000			√	12,000,000	100.00%					
				Operasional Kesehatan	3,600,000		√	3,600,000	3,250,000			√	3,250,000	90.28%					
				Perdin Kesehatan	2,500,000		√	2,500,000	2,460,000			√	2,460,000	98.40%					
				Pembinaan Mental Spiritual	14,400,000		√	14,400,000	14,400,000			√	14,400,000	100.00%					
				Rujukan Pasien & Obat-obatan	25,420,000		√	25,420,000	21,826,000			√	21,826,000	85.86%					
				Operasional Pengelola Permukiman Transmigrasi	19,000,000						√	19,000,000	18,979,600	99.89%					
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Desa	3,600,000		√	3,600,000	3,600,000			√	3,600,000	100.00%					
				Pengendalian dan Monitoring Pengadaan Saprotan (Provinsi)	5,860,000		√	5,860,000	5,860,000			√	5,860,000	100.00%					
				Pengendalian dan Monitoring Pengadaan Saprotan (Kabupaten)	1,120,000		√	1,120,000	700,000			√	700,000	62.50%					
				Pengadaan Sarana Produksi Penempatan Tahun Ke 3 (T3)	115,500,000		√	115,500,000	114,510,000			√	114,510,000	99.14%					
				Pengadaan bibit jagung	200,000,000			200,000,000	-			√	-	0.00%		Blokir			
				Rapat pembinaan dan pengembangan usaha SP Bina 2024	7,300,000		√	7,300,000	7,281,540			√	7,281,540	99.75%					
10	Saludeang	MAMUJU TENGAH	SULAWESI BARAT	Operasional Pendidikan	33,000,000	2018	√	33,000,000	33,000,000			√	33,000,000	100.00%					
				Insentif Kesehatan	12,000,000		√	12,000,000	12,000,000			√	12,000,000	100.00%					
				Operasional Kesehatan	3,600,000		√	3,600,000	3,600,000			√	3,600,000	100.00%					
				Perdin Kesehatan	1,580,000		√	1,580,000	1,400,000			√	1,400,000	88.61%					
				Pembinaan Mental Spiritual	10,800,000		√	10,800,000	10,800,000			√	10,800,000	100.00%					
				Rujukan Pasien & Obat-obatan (232)	23,740,000		√	23,740,000	23,740,000			√	23,740,000	100.00%					
				Operasional Pengelola Permukiman Transmigrasi	19,000,000						√	19,000,000	17,800,000	93.68%					
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Desa	3,600,000						√	3,600,000	3,300,000	91.67%					
				Pengendalian dan Monitoring Pengadaan Saprotan (Provinsi)	5,570,000		√	5,570,000	5,570,000			√	5,570,000	100.00%					
				Pengendalian dan Monitoring Pengadaan Saprotan (Kabupaten)	920,000		√	920,000	800,000			√	800,000	86.96%					
				Pengadaan Sarana Produksi Penempatan Tahun Ke 1 (T1)	35,100,000		√	35,100,000	35,077,500			√	35,077,500	99.94%					
				Pengadaan Sarana Produksi Penempatan Tahun Ke 3 (T3)	111,650,000		√	111,650,000	111,650,000			√	111,650,000	100.00%					
11	Salihisusu	MAMUJU TENGAH	SULAWESI BARAT	Operasional Pendidikan	33,000,000	2021	√	33,000,000	33,000,000			√	33,000,000	100.00%					
				Insentif Kesehatan	12,000,000		√	12,000,000	12,000,000			√	12,000,000	100.00%					
				Operasional Kesehatan	3,600,000		√	3,600,000	3,600,000			√	3,600,000	100.00%					
				Perdin Kesehatan	1,580,000		√	1,580,000	1,400,000			√	1,400,000	88.61%					
				Pembinaan Mental Spiritual	10,800,000		√	10,800,000	10,800,000			√	10,800,000	100.00%					
				Rujukan Pasien & Obat-obatan	11,420,000		√	11,420,000	11,420,000			√	11,420,000	100.00%					
				Bantuan Perlengkapan PUSTU	20,000,000			20,000,000	-			√	-	0.00%		blokir			
				Facilitasi Penuhmbuhan/Pembentukan Poktan (Gapoktan)	22,500,000		√	22,500,000	21,500,000			√	21,500,000	95.56%					
				Operasional Pengelola Permukiman Transmigrasi	19,000,000						√	19,000,000	17,800,000	93.68%					
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Desa	3,600,000		√	3,600,000	3,300,000			√	3,300,000	91.67%					

NO	SP	KABUPATEN	PROVINSI	KEGIATAN	Rp	Penempatan Tahun	TAHAP PERKEMBANGAN SP										REALISASI Rp	% Rp	% Fisik	CAPAIAN OUTPUT
							Tahap Penyesuaian			Tahap Pemantapan			Tahap kemandirian							
							Cek list	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	Cek list	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	Cek list	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	Cek list				
				Pengendalian dan Monitoring Pengadaan Saprotan (Kabupaten)	920,000		√	920,000	800,000						800,000	86.96%				
				Pengadaan Sarana Produksi Penempatan Tahun Ke 1 (T1)	18,000,000		√	18,000,000	18,000,000						18,000,000	100.00%				
				Pengadaan Sarana Produksi Penempatan Tahun ke 2 (T2)	123,300,000		√	123,300,000	123,300,000						123,300,000	100.00%				
				Pengadaan Sarana Produksi Penempatan Tahun ke 3 (T3)	69,300,000					√	69,300,000	68,992,390			68,992,390	99.56%				
				Rapat pembinaan dan pengembangan usaha SP Bina 2024	6,000,000		√	6,000,000	5,700,000						5,700,000	95.00%				
12	Tanjung Cina	MAMUJU UTARA/PASANGKAYU	SULAWESI BARAT	Operasional Pendidikan	33,000,000	2018	√	33,000,000	33,000,000						33,000,000	100.00%				
				Insentif Kesehatan	12,000,000		√	12,000,000	12,000,000						12,000,000	100.00%				
				Operasional Kesehatan	3,600,000		√	3,600,000	3,600,000						3,600,000	100.00%				
				Perdin Kesehatan	1,580,000		√	1,580,000	1,580,000						1,580,000	100.00%				
				Pembinaan Mental Spiritual	14,400,000		√	14,400,000	7,200,000						7,200,000	50.00%				
				Rujukan Pasien & Obat-obatan	13,450,000		√	13,450,000	13,450,000						13,450,000	100.00%				
				Fasilitasi Penumbuhan/Pembentukan Poktan/Gapoktan	22,500,000		√	22,500,000	22,500,000						22,500,000	100.00%				
				Operasional Pengelola Permukiman Transmigrasi	19,000,000							√	19,000,000	17,800,000	17,800,000	93.68%				
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Desa	3,600,000							√	3,600,000	3,600,000	3,600,000	100.00%				
				Pengendalian dan Monitoring Pengadaan Saprotan (Provinsi)	5,860,000		√	5,860,000	5,860,000						5,860,000	100.00%				
				Pengendalian dan Monitoring Pengadaan Saprotan (Kabupaten)	920,000					√	920,000	920,000			920,000	100.00%				
				Pengadaan Sarana Produksi Penempatan Tahun Ke 1 (T1)	19,500,000		√	19,500,000	19,498,200						19,498,200	99.99%				
				Pengadaan Sarana Produksi Penempatan Tahun Ke 2 (T2)	150,800,000		√	150,800,000	150,793,500						150,793,500	100.00%				
				Pengadaan Sarana Produksi Penempatan Tahun ke 3 (T3)	144,450,000					√	144,450,000	143,957,000			143,957,000	99.66%				
13	Raimuna	MUNA	SULAWESI TENGGARA	Operasional Pendidikan	27,000,000	2018	√	27,000,000	27,000,000						27,000,000	100.00%				
				Insentif Kesehatan	12,000,000		√	12,000,000	12,000,000						12,000,000	100.00%				
				Operasional Kesehatan	3,600,000		√	3,600,000	3,600,000						3,600,000	100.00%				
				Perdin Kesehatan	2,680,000		√	2,680,000	2,677,000						2,677,000	99.89%				
				Pembinaan Mental Spiritual	7,200,000		√	7,200,000	7,200,000						7,200,000	100.00%				
				Rujukan Pasien & Obat-obatan	27,520,000		√	27,520,000	27,520,000						27,520,000	100.00%				
				Fasilitasi Penumbuhan/Pembentukan Poktan/Gapoktan	22,500,000		√	22,500,000	22,500,000						22,500,000	100.00%				
				Operasional Pengelola Permukiman Transmigrasi	19,000,000							√	19,000,000	19,000,000	19,000,000	100.00%				
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Desa	3,600,000							√	3,600,000	3,600,000	3,600,000	100.00%				
				Pengendalian dan Monitoring Pengadaan Saprotan (Provinsi)	7,000,000					√	7,000,000	6,880,000			6,880,000	98.29%				
				Pengendalian dan Monitoring Pengadaan Saprotan (Kabupaten)	1,020,000					√	1,020,000	1,020,000			1,020,000	100.00%				
				Pengadaan Sarana Produksi Penempatan Tahun Ke 2 (T2)	89,050,000		√	89,050,000	88,660,000						88,660,000	99.56%				
				Pengadaan Sarana Produksi Penempatan Tahun ke 3 (T3)	254,100,000					√	254,100,000	253,990,000			253,990,000	99.96%				
				Rapat pembinaan dan pengembangan usaha SP Bina 2024	4,200,000		√	4,200,000	4,200,000						4,200,000	100.00%				
				Rehab Embara di SP Raimuna	50,000,000	T+2		50,000,000	49,898,000						49,898,000	99.80%	100%	1 unit		
14	Watufinawu	KONawe	SULAWESI TENGGARA	Operasional Pendidikan	27,000,000	2018	√	27,000,000	27,000,000						27,000,000	100.00%				
				Insentif Kesehatan	12,000,000		√	12,000,000	12,000,000						12,000,000	100.00%				
				Operasional Kesehatan	3,600,000		√	3,600,000	3,600,000						3,600,000	100.00%				
				Perdin Kesehatan	1,490,000		√	1,490,000	1,490,000						1,490,000	100.00%				
				Pembinaan Mental Spiritual	7,200,000		√	7,200,000	7,200,000						7,200,000	100.00%				
				Rujukan Pasien & Obat-obatan	15,200,000		√	15,200,000	12,560,000						12,560,000	82.63%				
				Bantuan Perlengkapan PUSTU	20,000,000											0.00%		Blokir		
				Fasilitasi Penumbuhan/Pembentukan Poktan/Gapoktan	22,500,000		√	22,500,000	22,500,000						22,500,000	100.00%				
				Operasional Pengelola Permukiman Transmigrasi	19,000,000							√	19,000,000	19,000,000	19,000,000	100.00%				
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Desa	3,600,000							√	3,600,000	3,600,000	3,600,000	100.00%				
				Pengendalian dan Monitoring Pengadaan Saprotan (Provinsi)	2,120,000					√	2,120,000	2,120,000			2,120,000	100.00%				
				Pengendalian dan Monitoring Pengadaan Saprotan (Kabupaten)	820,000					√	820,000	820,000			820,000	100.00%				
				Pengadaan Sarana Produksi Penempatan Tahun Ke 2 (T2)	102,750,000		√	102,750,000	101,691,594						101,691,594	98.97%				
				Pengadaan Sarana Produksi Penempatan Tahun ke 3 (T3)	134,750,000					√	134,750,000	133,809,806			133,809,806	99.30%				
				Rapat pembinaan dan pengembangan usaha SP Bina 2024	4,200,000		√	4,200,000	4,200,000						4,200,000	100.00%				
15	Kotakawaw Sp.5 (Pugar)	SUMBA TIMUR	NTT	Operasional Pendidikan	27,000,000	2018	√	27,000,000	27,000,000						27,000,000	100.00%				
				Insentif Kesehatan	12,000,000		√	12,000,000	12,000,000						12,000,000	100.00%				
				Operasional Kesehatan	3,600,000		√	3,600,000	3,600,000						3,600,000	100.00%				
				Perdin Kesehatan	1,170,000		√	1,170,000	1,170,000						1,170,000	100.00%				
				Pembinaan Mental Spiritual	7,200,000		√	7,200,000	7,200,000						7,200,000	100.00%				
				Rujukan Pasien & Obat-obatan (94)	14,080,000		√	14,080,000	14,080,000						14,080,000	100.00%				
				Fasilitasi Penumbuhan/Pembentukan Poktan/Gapoktan	22,500,000		√	22,500,000	22,500,000						22,500,000	100.00%				
				Operasional Pengelola Permukiman Transmigrasi	19,000,000							√	19,000,000	19,000,000	19,000,000	100.00%				
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Desa	3,600,000							√	3,600,000	3,600,000	3,600,000	100.00%				
				Pengendalian dan Monitoring Pengadaan Saprotan (provinsi)	12,560,000					√	12,560,000	12,560,000			12,560,000	100.00%				
				Pengendalian dan Monitoring Pengadaan Saprotan (Kabupaten)	5,300,000					√	5,300,000	5,260,000			5,260,000	99.25%				
				Pengadaan Sarana Produksi Penempatan Tahun ke 2 (T2)	98,510,000		√	98,510,000	98,508,450						98,508,450	100.00%				
				Pengadaan Sarana Produksi Penempatan Tahun ke 3 (T3)	42,350,000					√	42,350,000	42,348,900			42,348,900	100.00%				
				Rapat pembinaan dan pengembangan usaha SP Bina 2024	6,400,000		√	6,400,000	6,400,000						6,400,000	100.00%				

NO	SP	KABUPATEN	PROVINSI	KEGIATAN	Rp	Penempatan Tahun	TAHAP PERKEMBANGAN SP										REALISASI Rp	% Rp	% Fisik	CAPAIAN OUTPUT	
							Tahap Penyesuaian			Tahap Pematapan			Tahap kemandirian								
							Cek list	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	Cek list	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	Cek list	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	Cek list					
16	Kapitan Meo (Sdt+Pugar)	MALAKA	NTT	Operasional Pendidikan	27,000,000					√	27,000,000	27,000,000					√	27,000,000	100.00%		
				Insentif Kesehatan	12,000,000					√	12,000,000	12,000,000				√	12,000,000	100.00%			
				Operasional Kesehatan	3,600,000					√	3,600,000	3,600,000				√	3,600,000	100.00%			
				Perdin Kesehatan	1,210,000					√	1,210,000	1,210,000				√	1,210,000	100.00%			
				Pembinaan Mental Spiritual	7,200,000					√	7,200,000	7,200,000				√	7,200,000	100.00%			
				Rujukan Pasien & Obat-obatan (57)	11,490,000					√	11,490,000	11,490,000				√	11,490,000	100.00%			
				Operasional Pengelola Permukiman Transmigrasi	19,000,000											√	19,000,000	100.00%			
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Desa	3,600,000											√	3,600,000	100.00%			
				Pengendalian dan Monitoring Pengadaan Saprotan (Provinsi)	5,980,000											√	5,980,000	100.00%			
				Pengendalian dan Monitoring Pengadaan Saprotan (Kabupaten)	1,060,000											√	1,060,000	100.00%			
Pengadaan Sarana Produksi Penempatan Tahun Ke 3 (T3)	123,200,000										√	123,197,200	100.00%								
Rapat pembinaan dan pengembangan usaha SP Bina 2024	6,400,000					√	6,400,000	6,395,640				√	6,395,640	99.93%							
17	Muting Sp XII	MERAUKE	PAPUA	Operasional Pendidikan	39,000,000					√	39,000,000	39,000,000					√	39,000,000	100.00%		
				Insentif Kesehatan	12,000,000					√	12,000,000	12,000,000				√	12,000,000	100.00%			
				Operasional Kesehatan	3,600,000					√	3,600,000	3,600,000				√	3,600,000	100.00%			
				Perdin Kesehatan	2,290,000					√	2,290,000	2,290,000				√	2,290,000	100.00%			
				Pembinaan Mental Spiritual	7,200,000					√	7,200,000	7,200,000				√	7,200,000	100.00%			
				Rujukan Pasien & Obat-obatan	21,430,000					√	21,430,000	21,430,000				√	21,430,000	100.00%			
				Operasional Pengelola Permukiman Transmigrasi	19,000,000											√	19,000,000	100.00%			
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Desa	3,600,000											√	3,600,000	100.00%			
				Pengendalian dan Monitoring Pengadaan Saprotan (Provinsi)	8,680,000											√	8,680,000	100.00%			
				Pengendalian dan Monitoring Pengadaan Saprotan (Kabupaten)	1,840,000											√	1,840,000	100.00%			
Pengadaan Sarana Produksi Penempatan Tahun Ke 3 (T3)	65,450,000										√	65,399,000	99.92%								
Rapat pembinaan dan pengembangan usaha SP Bina 2024	8,600,000					√	8,600,000	8,130,000				√	8,130,000	94.53%							
Rehabilitasi Kantor Ka IPT Muting SP XII	50,000,000				T+3				√	50,000,000	50,000,000				√	50,000,000	100.00%	100%	1 unit		
18	Lok. Werianggi Sp. 2	TELUK WONDAMA	PAPUA BARAT	Operasional Pendidikan	27,000,000	2022		√	27,000,000	27,000,000							√	27,000,000	100.00%		
				Insentif Kesehatan	12,000,000					√	12,000,000	12,000,000				√	12,000,000	100.00%			
				Operasional Kesehatan	3,600,000					√	3,600,000	3,600,000				√	3,600,000	100.00%			
				Perdin Kesehatan	1,243,000					√	1,243,000	-				√	-	0.00%			
				Pembinaan Mental Spiritual	7,200,000					√	7,200,000	7,200,000				√	7,200,000	100.00%			
				Rujukan Pasien & Obat-obatan	9,250,000					√	9,250,000	8,740,000				√	8,740,000	94.49%			
				Fasilitasi Penumbuhan/Pembentukan Poktan/Gapoktan	22,500,000					√	22,500,000	22,500,000				√	22,500,000	100.00%			
				Operasional Pengelola Permukiman Transmigrasi	19,000,000											√	19,000,000	100.00%			
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Desa	3,600,000											√	3,600,000	100.00%			
				Pengendalian dan Monitoring Pengadaan Saprotan (Provinsi)	8,680,000											√	8,680,000	100.00%			
Pengendalian dan Monitoring Pengadaan Saprotan (kabupaten)	-										√	-	-								
Pengadaan Sarana Produksi Penempatan Tahun Ke 2 (T2)	68,500,000					√	68,500,000	68,463,168				√	68,463,168	99.95%							
Pengadaan Sarana Produksi Penempatan Tahun Ke 3 (T3)	57,750,000										√	57,750,000	100.00%								
19	Kahingai (Sp Pugar)	LAMANDAU	KALIMANTAN TENGAH	Operasional Pendidikan	27,000,000	2018		√	27,000,000	27,000,000							√	27,000,000	100.00%		
				Insentif Kesehatan	12,000,000					√	12,000,000	12,000,000				√	12,000,000	100.00%			
				Operasional Kesehatan	3,600,000					√	3,600,000	3,600,000				√	3,600,000	100.00%			
				Perdin Kesehatan	1,840,000					√	1,840,000	-				√	-	0.00%			
				Pembinaan Mental Spiritual	7,200,000					√	7,200,000	7,200,000				√	7,200,000	100.00%			
				Rujukan Pasien & Obat-obatan	20,030,000					√	20,030,000	12,505,000				√	12,505,000	62.43%			
				Fasilitasi Penumbuhan/Pembentukan Poktan/Gapoktan	22,500,000					√	22,500,000	19,950,000				√	19,950,000	88.67%			
				Operasional Pengelola Permukiman Transmigrasi	19,000,000											√	19,000,000	100.00%			
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Desa	3,600,000											√	3,600,000	100.00%			
				Pengendalian dan Monitoring Pengadaan Saprotan (Provinsi)	5,560,000						√	5,560,000	5,560,000				√	5,560,000	100.00%		
Pengendalian dan Monitoring Pengadaan Saprotan (kabupaten)	880,000										√	880,000	520,000	59.09%							
Pengadaan Sarana Produksi Penempatan Tahun Ke 1 (T1)	7,000,000					√	7,000,000	6,922,300				√	6,922,300	98.89%							
Pengadaan Sarana Produksi Penempatan Tahun Ke 1 (T1)	13,650,000					√	13,650,000	13,388,900				√	13,388,900	98.09%							
Pengadaan Sarana Produksi Penempatan Tahun Ke 2 (T2)	47,950,000					√	47,950,000	47,350,200				√	47,350,200	98.75%							
Pengadaan Sarana Produksi Penempatan Tahun Ke 3 (T3)	42,350,000										√	42,350,000	42,350,000	100.00%							
Rapat Pembinaan dan Pengembangan Usaha SP Bina 2024	6,400,000						√	6,400,000	2,823,530				√	2,823,530	44.12%						
20	Tj. Buka Sp. 6 Blok B	BULUNGAN	KALIMANTAN UTARA	Operasional Pendidikan	27,000,000	2018		√	27,000,000	27,000,000							√	27,000,000	100.00%		
				Insentif Kesehatan	10,400,000					√	10,400,000	10,400,000				√	10,400,000	100.00%			
				Operasional Kesehatan	3,600,000					√	3,600,000	3,600,000				√	3,600,000	100.00%			
				Perdin Kesehatan	1,740,000					√	1,740,000	1,740,000				√	1,740,000	100.00%			
				Pembinaan Mental Spiritual	7,200,000					√	7,200,000	7,200,000				√	7,200,000	100.00%			
				Rujukan Pasien & Obat-obatan (250)	25,000,000					√	25,000,000	25,000,000				√	25,000,000	100.00%			
				Operasional Pengelola Permukiman Transmigrasi	20,600,000											√	20,600,000	100.00%			
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Desa	3,600,000											√	3,600,000	100.00%			
				Rehab/Peningkatan drainase di SP Tj. Buka Sp. 6 Blok B	120,000,000					T+6						√	120,000,000	119,954,000	99.96%	100%	0.5 km
				21	Pangea Sp. 3		BOALEMO	GORONTALO	Operasional Pendidikan	33,000,000	2016		√	33,000,000	33,000,000						
Insentif Kesehatan	12,000,000								√	12,000,000		12,000,000				√	12,000,000	100.00%			
Operasional Kesehatan	3,600,000								√	3,600,000		3,600,000				√	3,600,000	100.00%			
Perdin Kesehatan	1,510,000								√	1,510,000		1,500,000				√	1,500,000	99.34%			
Pembinaan Mental Spiritual	7,200,000								√	7,200,000		7,200,000				√	7,200,000	100.00%			
Rujukan Pasien & Obat-obatan	18,000,000								√	18,000,000		17,649,160				√	17,649,160	98.05%			
Operasional Pengelola Permukiman Transmigrasi	19,000,000										√	19,000,000	100.00%								
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Desa	3,600,000										√	3,600,000	100.00%								

NO	SP	KABUPATEN	PROVINSI	KEGIATAN	Rp	Penempatan Tahun	TAHAP PERKEMBANGAN SP										REALISASI Rp	% Rp	% Fisik	CAPAIAN OUTPUT
							Tahap Penyesuaian			Tahap Pemantapan			Tahap kemandirian							
							Cek list	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	Cek list	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	Cek list	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	Cek list				
				Rapat Pembinaan dan Pengembangan Usaha SP Bina 2024	4,200,000		√	4,200,000	4,115,649							4,115,649	97.99%			
22	Sandalan	PAHUWATO	GORONTALO	Operasional Pendidikan	27,000,000	2016					√	27,000,000	27,000,000	√	27,000,000	100.00%				
				Insentif Kesehatan	12,000,000						√	12,000,000	12,000,000	√	12,000,000	100.00%				
				Operasional Kesehatan	3,600,000						√	3,600,000	3,600,000	√	3,600,000	100.00%				
				Perdin Kesehatan	1,510,000						√	1,510,000	1,500,000	√	1,500,000	99.34%				
				Pembinaan Mental Spiritual	7,200,000						√	7,200,000	7,200,000	√	7,200,000	100.00%				
				Rujukan Pasien & Obat-obatan	19,050,000						√	19,050,000	19,392,110	√	19,392,110	101.80%				
				Operasional Pengelola Permukiman Transmigrasi	19,000,000											18,995,920	99.98%			
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Desa	3,600,000						√	3,600,000	3,600,000	√	3,600,000	100.00%				
23	Motihelumo	GORONTALO UTARA	GORONTALO	Rehab jembatan di SP Sandalan Kab. Pohnuato	200,000,000	T+6 2016									200,000,000	199,950,000	99.98%	100%	4 m	
				Operasional Pendidikan	27,000,000					√	27,000,000	27,000,000			27,000,000	100.00%				
				Insentif Kesehatan	12,000,000					√	12,000,000	12,000,000			12,000,000	100.00%				
				Operasional Kesehatan	3,600,000					√	3,600,000	3,600,000			3,600,000	100.00%				
				Perdin Kesehatan	1,510,000					√	1,510,000	1,510,000			1,510,000	100.00%				
				Pembinaan Mental Spiritual	7,200,000					√	7,200,000	7,200,000			7,200,000	100.00%				
				Rujukan Pasien & Obat-obatan	17,650,000					√	17,650,000	17,650,000			17,650,000	100.00%				
				Operasional Pengelola Permukiman Transmigrasi	19,000,000						√	19,000,000	19,000,000			19,000,000	100.00%			
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Desa	3,600,000						√	3,600,000	3,600,000			3,600,000	100.00%			
				Pengendalian dan Monitoring Pengadaan Saprotan (Provinsi)	6,520,000					√	6,520,000	6,520,000			6,520,000	100.00%				
				Pengendalian dan Monitoring Pengadaan Saprotan (kabupaten)	2,200,000					√	2,200,000	2,200,000			2,200,000	100.00%				
				Pengadaan Sarana Produksi Penempatan Tahun ke 3 (T3)	42,350,000					√	42,350,000	42,332,000			42,332,000	99.96%				
				Pengadaan Gerobak Motor	50,000,000										50,000,000	-	0.00%	Blokir		
				Rapat Pembinaan dan Pengembangan Usaha SP Bina 2024	4,200,000		√	4,200,000	4,200,000						4,200,000	100.00%				
				Rehabilitasi Jembatan Non Standar 10 m di SP Motihelumo	144,670,000	T+3									52,170,000	144,545,350	99.91%	100%	15 m	
				Rehabilitasi Jembatan Non Standar 5 m di SP Motihelumo											92,500,000					
24	Bolupunto /Sidera	SIGI	SULAWESI TENGAH	Operasional Pendidikan	39,000,000							√	39,000,000	39,000,000	√	39,000,000	100.00%			
				Insentif Kesehatan	12,000,000							√	12,000,000	12,000,000	√	12,000,000	100.00%			
				Operasional Kesehatan	3,600,000							√	3,600,000	3,600,000	√	3,600,000	100.00%			
				Perdin Kesehatan	1,460,000							√	1,460,000	1,350,000	√	1,350,000	92.47%			
				Pembinaan Mental Spiritual	7,200,000							√	7,200,000	7,200,000	√	7,200,000	100.00%			
				Rujukan Pasien & Obat-obatan (100)	16,775,000							√	16,775,000	16,473,500	√	16,473,500	98.20%			
				Operasional Pengelola Permukiman Transmigrasi	20,200,000							√	20,200,000	20,200,000	√	20,200,000	100.00%			
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Desa	3,600,000							√	3,600,000	3,600,000	√	3,600,000	100.00%			
25	Upt Iania	TOLI-TOLI	SULAWESI TENGAH	Operasional Pendidikan	39,000,000	2018	√	39,000,000	36,500,000						36,500,000	93.59%				
				Insentif Kesehatan	12,000,000		√	12,000,000	9,200,000						9,200,000	76.67%				
				Operasional Kesehatan	3,600,000		√	3,600,000	3,600,000						3,600,000	100.00%				
				Perdin Kesehatan	1,460,000		√	1,460,000	1,460,000						1,460,000	100.00%				
				Pembinaan Mental Spiritual	7,200,000		√	7,200,000	7,200,000						7,200,000	100.00%				
				Rujukan Pasien & Obat-obatan	11,700,000		√	11,700,000	7,200,000						7,200,000	61.54%				
				Fasilitasi Penumbuhan/Pembentukan Poktan/Gapoktan	22,500,000		√	22,500,000	22,500,000						22,500,000	100.00%				
				Operasional Pengelola Permukiman Transmigrasi	19,000,000							√	19,000,000	19,000,000	√	19,000,000	100.00%			
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Desa	3,600,000							√	3,600,000	3,600,000	√	3,600,000	100.00%			
				Pengendalian dan Monitoring Pengadaan Saprotan (Provinsi)	6,620,000		√	6,620,000	6,620,000						6,620,000	100.00%				
				Pengendalian dan Monitoring Pengadaan Saprotan (kabupaten)	900,000		√	900,000	900,000						900,000	100.00%				
				Pengadaan Sarana Produksi Penempatan Tahun Ke 1 (T1)	68,500,000		√	68,500,000	68,354,000						68,354,000	99.79%				
				Rehab SAB UPT Janja	50,000,000	T+2 (penempatan 2019)									50,000,000	100.00%	100%	1 unit		
26	Tongauna	KOLAKA TIMUR	SULAWESI TENGGARA	Penghilauan di SP Tongauna	50,000,000	T+6 (serah 2024)									50,000,000	-	0.00%	Blokir		
27	Lakabu Dan Momuntu	MUNA BARAT	SULAWESI TENGGARA	Belanja Bahan	6,250,000	2018						√	6,250,000	6,240,000	√	6,240,000	99.84%			
				Operasional Pendidikan	21,000,000							√	21,000,000	21,000,000	√	21,000,000	100.00%			
				Insentif Kesehatan	12,000,000							√	12,000,000	12,000,000	√	12,000,000	100.00%			
				Operasional Kesehatan	3,600,000							√	3,600,000	3,600,000	√	3,600,000	100.00%			
				Perdin Kesehatan	8,480,000							√	8,480,000	8,480,000	√	8,480,000	100.00%			
				Pembinaan Mental Spiritual	7,200,000							√	7,200,000	7,200,000	√	7,200,000	100.00%			
				Rujukan Pasien & Obat-obatan	3,760,000							√	3,760,000	3,500,000	√	3,500,000	93.09%			
				Bantuan Perlengkapan PUSTU	20,000,000										-	-	0.00%	Blokir		
				Operasional Pengelola Permukiman Transmigrasi	20,740,000							√	20,740,000	20,740,000	√	20,740,000	100.00%			
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Desa	3,600,000							√	3,600,000	3,600,000	√	3,600,000	100.00%			
28	Kotakaw Sp.7	SUMBA TIMUR	NTT	Operasional Pendidikan	27,000,000	2019						√	27,000,000	27,000,000	√	27,000,000	100.00%			
				Insentif Kesehatan	12,000,000							√	12,000,000	12,000,000	√	12,000,000	100.00%			
				Operasional Kesehatan	3,600,000							√	3,600,000	3,600,000	√	3,600,000	100.00%			
				Perdin Kesehatan	1,170,000							√	1,170,000	1,170,000	√	1,170,000	100.00%			
				Pembinaan Mental Spiritual	7,200,000							√	7,200,000	7,200,000	√	7,200,000	100.00%			
				Rujukan Pasien & Obat-obatan (75)	12,750,000							√	12,750,000	12,750,000	√	12,750,000	100.00%			
				Operasional Pengelola Permukiman Transmigrasi	19,000,000							√	19,000,000	19,000,000	√	19,000,000	100.00%			
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Desa	3,600,000							√	3,600,000	3,600,000	√	3,600,000	100.00%			
29	Kapitan Meo (Baru)	MALAKA	NTT	Operasional Pendidikan	27,000,000	2019						√	27,000,000	27,000,000	√	27,000,000	100.00%			
				Insentif Kesehatan	12,000,000							√	12,000,000	12,000,000	√	12,000,000	100.00%			
				Operasional Kesehatan	3,600,000							√	3,600,000	3,600,000	√	3,600,000	100.00%			
				Perdin Kesehatan	1,210,000							√	1,210,000	1,210,000	√	1,210,000	100.00%			
				Pembinaan Mental Spiritual	7,200,000							√	7,200,000	7,200,000	√	7,200,000	100.00%			
				Rujukan Pasien & Obat-obatan (50)	11,000,000							√	11,000,000	11,000,000	√	11,000,000	100.00%			
				Bantuan Perlengkapan PUSTU	20,000,000										-	-	0.00%	Blokir		
				Operasional Pengelola Permukiman Transmigrasi	19,000,000							√	19,000,000	19,000,000	√	19,000,000	100.00%			
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Desa	3,600,000							√	3,600,000	3,600,000	√	3,600,000	100.00%			
30	Pante Cermin	ACEH BARAT DAYA	ACEH	Operasional Pengelola Permukiman Transmigrasi	1,959,000	2016						√	1,959,000	1,957,000	√	1,957,000	99.90%			
			</																	

NO	SP	KABUPATEN	PROVINSI	KEGIATAN	Rp	Penempatan Tahun	TAHAP PERKEMBANGAN SP											REALISASI Rp	% Rp	% Fisik	CAPAIAN OUTPUT	
							Tahap Penyesuaian			Tahap Pemantapan			Tahap kemandirian									
							Cek list	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	Cek list	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	Cek list	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	Cek list						
				Operasional Pengelola Permukiman Transmigrasi	19,000,000								v	19,000,000	19,000,000	v	19,000,000	100.00%				
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Desa	3,600,000								v	3,600,000	3,600,000	v	3,600,000	100.00%				
				Pengadaan Sarana Produksi Penempatan Tahun Ke 1 (T1)	37,050,000								v	37,050,000	31,170,000			84.13%				
				Pengadaan Alat Pengolah Pisang	40,867,000										40,867,000	-		-	0.00%			
				Rapat pembinaan dan pengembangan usaha SP Bina 2024	2,400,000								v	2,400,000	2,400,000	v	2,400,000	100.00%				
				Peningkatan jalan poros di SP Padang Tarok	562,300,000		T>6 (ada penempatan baru 2024)								562,300,000	561,965,000		561,965,000	99.94%	100%	0.68 m	
				Rehab lembatan di SP Padang Tarok	383,600,000										383,600,000	382,237,000		382,237,000	99.64%	100%	12 m	
32	Batu Ampar	BENGKULU SELATAN	BENGKULU	Pengendalian dan Monitoring Pengadaan Saprotan (Provinsi)	5,880,000	2018									5,880,000	5,880,000		5,880,000	100.00%			
				Pengendalian dan Monitoring Pengadaan Saprotan (Kabupaten)	900,000										900,000	-		-	0.00%			
				Facilitasi Penumbuhan/Pembentukan Poktan/Gapoktan	22,500,000								v	22,500,000	22,500,000		22,500,000	100.00%				
				Operasional Pengelola Permukiman Transmigrasi	19,000,000									v	19,000,000	19,000,000	v	19,000,000	100.00%			
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Desa	3,600,000									v	3,600,000	3,600,000	v	3,600,000	100.00%			
				Pengadaan Sarana Produksi Penempatan Tahun ke 2 (T2)	75,350,000									v	75,350,000	75,200,000	v	75,200,000	99.80%			
				Operasional Pendidikan	39,000,000										39,000,000	39,000,000		39,000,000	100.00%			
				Insentif Kesehatan	12,000,000										12,000,000	12,000,000		12,000,000	100.00%			
				Operasional Kesehatan	3,600,000										3,600,000	3,600,000		3,600,000	100.00%			
				Perdin Kesehatan	1,640,000										1,640,000	1,600,000		1,600,000	97.56%			
				Pembinaan Mental Spiritual	7,200,000										7,200,000	7,200,000		7,200,000	100.00%			
				Rujukan Pasien & Obat-obatan	9,950,000										9,950,000	9,950,000		9,950,000	100.00%			
33	Tempirai Barat	PALI	SUMATERA SELATAN	Operasional Pendidikan	-										-	-		-	-			
				Insentif Kesehatan	12,000,000										12,000,000	10,000,000		10,000,000	83.33%			
				Operasional Kesehatan	3,600,000										3,600,000	2,400,000		2,400,000	66.67%			
				Perdin Kesehatan	1,640,000										1,640,000	1,640,000		1,640,000	100.00%			
				Pembinaan Mental Spiritual	7,200,000										7,200,000	7,200,000		7,200,000	100.00%			
				Rujukan Pasien & Obat-obatan	9,670,000										9,670,000	5,184,000		5,184,000	53.61%			
34	Sungai Beruang (Sp. Pugur)	KAB. SANGGAU	KALIMANTAN BARAT	Operasional Pengelola Permukiman Transmigrasi	19,000,000	2016									19,000,000	19,000,000		19,000,000	100.00%			
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Desa	3,600,000										3,600,000	3,600,000		3,600,000	100.00%			
35	Semunying	KAB. BENGKAYANG	KALIMANTAN BARAT	Operasional Pengelola Permukiman Transmigrasi	19,000,000	2017									19,000,000	19,000,000		19,000,000	100.00%			
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Desa	3,600,000										3,600,000	3,600,000		3,600,000	100.00%			
36	Sebetung Paluk	KAB. SINTANG	KALIMANTAN BARAT	Peningkatan jalan (pindah ke direktorat pembangunan)	-	T>6 (serah 2024)									-	-		-	-			
37	Nanga Bayan	KAB. SINTANG	KALIMANTAN BARAT	Operasional Pengelola Permukiman Transmigrasi	19,000,000	2016									19,000,000	17,800,000		17,800,000	93.68%			
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Desa	3,600,000										3,600,000	3,600,000		3,600,000	100.00%			
38	Sepungur	BULUNGAN	KALIMANTAN UTARA	Operasional Pendidikan	27,000,000	2016									27,000,000	27,000,000		27,000,000	100.00%			
				Insentif Kesehatan	10,400,000										10,400,000	10,400,000		10,400,000	100.00%			
				Operasional Kesehatan	3,600,000										3,600,000	3,600,000		3,600,000	100.00%			
				Perdin Kesehatan	1,740,000										1,740,000	1,740,000		1,740,000	100.00%			
				Pembinaan Mental Spiritual	7,200,000										7,200,000	7,200,000		7,200,000	100.00%			
				Rujukan Pasien & Obat-obatan (537)	45,090,000										45,090,000	45,071,196		45,071,196	99.96%			
				Operasional Pengelola Permukiman Transmigrasi	20,600,000										20,600,000	20,600,000		20,600,000	100.00%			
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Desa	3,600,000										3,600,000	3,600,000		3,600,000	100.00%			
39	Kabera	MOROWALI	SULAWESI TENGAH	Pengadaan Ternak Kambing	100,000,000	2016									100,000,000	-		-	0.00%			
40	Dungkean	BANGGAI LAUT	SULAWESI TENGAH	Operasional Pengelola Permukiman Transmigrasi		2018									-	-		-	-			
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Desa											-	-		-	-			
				Pengadaan Bibit Benih cabai	10,000,000										10,000,000	-		-	-	0.00%		
				Pengadaan Bibit Sawi	10,000,000										10,000,000	-		-	-	0.00%		
				Pengadaan Bibit tomat	20,000,000										20,000,000	-		-	-	0.00%		
				Pengadaan bibit pepaya	10,000,000										10,000,000	-		-	-	0.00%		
41	Moian	PARIGI MOUTONG	SULAWESI TENGAH	Operasional Pengelola Permukiman Transmigrasi		2016									-	-		-	-			
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Desa											-	-		-	-			
42	Wala/Lagading	SIDRAP	SULAWESI SELATAN	Facilitasi Penumbuhan/Pembentukan Poktan/Gapoktan	27,200,000	2018									27,200,000	27,190,000		27,190,000	99.96%			
				Operasional Pengelola Permukiman Transmigrasi	20,700,000										20,700,000	20,700,000		20,700,000	100.00%			
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Desa	3,600,000										3,600,000	3,600,000		3,600,000	100.00%			
				Pengendalian dan Monitoring Pengadaan Saprotan (Provinsi)	6,380,000										6,380,000	3,320,000		3,320,000	52.04%			
				Pengendalian dan Monitoring Pengadaan Saprotan (Kabupaten)	940,000										940,000	940,000		940,000	100.00%			
				Pengadaan Sarana Produksi Penempatan Tahun ke 1 (T1)	39,250,000										39,250,000	38,116,595		38,116,595	97.11%			
				Pengadaan Sarana Produksi Penempatan Tahun ke 2 (T2)	143,300,000										143,300,000	142,559,160		142,559,160	99.48%			
				Operasional Pendidikan	27,000,000										27,000,000	27,000,000		27,000,000	100.00%			
				Insentif Kesehatan	12,000,000										12,300,000	12,300,000		12,300,000	102.50%			
				Operasional Kesehatan	3,600,000										3,600,000	3,600,000		3,600,000	100.00%			
				Perdin Kesehatan	1,640,000										1,640,000	1,471,694		1,471,694	89.74%			
				Pembinaan Mental Spiritual	7,200,000										7,200,000	6,900,000		6,900,000	95.83%			
				Rujukan Pasien & Obat-obatan	9,950,000										9,950,000	9,950,000		9,950,000	100.00%			
43	Ulu-manda Sp.2/Tamajannang	MAJENE	SULAWESI BARAT	Operasional Pengelola Permukiman Transmigrasi	19,000,000	2018									19,000,000	18,993,000		18,993,000	99.96%			
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Desa	3,600,000										3,600,000	3,600,000		3,600,000	100.00%			
44	Ratte	POLEWALI MANDAR	SULAWESI BARAT	Rehab fasum Ulu-manda Kolehalang SP 1	200,000,000										200,000,000	-		-	0.00%		Blakir	
				Operasional Pengelola Permukiman Transmigrasi	19,000,000	2022									19,000,000	19,000,000		19,000,000	100.00%			
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Desa	3,600,000										3,600,000	3,600,000		3,600,000	100.00%			
				Pengendalian dan Monitoring Pengadaan Saprotan (Provinsi)	5,860,000										5,860,000	5,860,000		5,860,000	100.00%			
				Pengendalian dan Monitoring Pengadaan Saprotan (Kabupaten)	1,120,000										1,120,000	1,120,000		1,120,000	100.00%			
				Pengadaan Sarana Produksi Penempatan Tahun ke 3 (T3)	73,150,000										73,150,000	73,149,050		73,149,050	100.00%			
				Operasional Pendidikan	27,000,000										27,000,000	27,000,000		27,000,000	100.00%			
				Insentif Kesehatan	12,000,000										12,000,000	12,000,000		12,000,000	100.00%			
				Operasional Kesehatan	3,600,000										3,600,000	3,600,000		3,600,000	100.00%			

NO	SP	KABUPATEN	PROVINSI	KEGIATAN	Rp	Penempatan Tahun	TAHAP PERKEMBANGAN SP											REALISASI Rp	% Rp	% Fisik	CAPAIAN OUTPUT
							Tahap Penyesuaian			Tahap Pemantapan			Tahap kemandirian								
							Cek list	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	Cek list	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	Cek list	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	Cek list					
				Perdin Kesehatan	1,580,000						√	1,580,000	1,580,000			√	1,580,000	100.00%			
				Pembinaan Mental Spiritual	7,200,000						√	7,200,000	7,200,000			√	7,200,000	100.00%			
				Ruiluk Pasien & Obat-obatan	8,830,000						√	8,830,000	8,830,000			√	8,830,000	100.00%			
				Bantuan Perlengkapan PUSTU	20,000,000							20,000,000	-				-	0.00%		blokir	
				Peningkatan jalan SP Ratte	834,500,000		T+3						834,500,000	834,260,500				834,260,500	99.97%	100%	0.5 km
45	Parudongka	KONAWA	SULAWESI TENGGARA	Rehab SD SP Parudongka	259,300,000		T+6 (serah 2024)										259,300,000	133,176,000	51.36%	50%	1 unit
46	Mahodopi	KEP SULA	MALUKU UTARA	Pengembangan Tanaman Durian dan Rambutan	50,000,000		2017										50,000,000	-	0.00%		Blokir
47	Upt Remangsufui	ALOR	NTT	Operasional Pengelola Permukiman Transmigrasi	19,000,000		2018								√	19,000,000	19,000,000	100.00%			
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Desa	3,600,000										√	3,600,000	3,600,000	100.00%			
48	Peibulak	BELLU	NTT	Operasional Pengelola Permukiman Transmigrasi	19,000,000		2018								√	19,000,000	19,000,000	100.00%			
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Desa	3,600,000										√	3,600,000	3,600,000	100.00%			
				Peningkatan jalan Burog SP Peibulak	565,030,000		T+6										565,030,000	565,003,544	100.00%	100.00%	0.5 km
49	Wemaringi	SUMBA BARAT	NTT	Operasional Pendidikan	27,000,000		2018	√	27,000,000	17,500,000							17,500,000	64.81%			
				Insentif Kesehatan	12,000,000			√	12,000,000	3,000,000							3,000,000	25.00%			
				Operasional Kesehatan	3,600,000												-	0.00%			
				Perdin Kesehatan	1,210,000												-	0.00%			
				Pembinaan Mental Spiritual	7,200,000			√	7,200,000	6,000,000							6,000,000	83.33%			
				Ruiluk Pasien & Obat-obatan	8,900,000												-	0.00%			
				Operasional Pengelola Permukiman Transmigrasi	19,000,000										√	19,000,000	19,000,000	100.00%			
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Desa	3,600,000										√	3,600,000	3,000,000	83.33%			
				Monitoring Evaluasi dan pengendalian sarana produksi (Kabupaten)	1,060,000										√	1,060,000	1,060,000	100.00%			
				Fasilitas Penumbuhan/Pembentukan Poktan/Gapoktan	22,500,000			√	22,500,000	21,500,000							21,500,000	95.56%			
				Pengadaan Sarana Produksi Penempatan Tahun ke 2 (T2)	34,250,000			√	34,250,000	34,152,400							34,152,400	99.72%			
				Pengadaan Sarana Produksi Penempatan Tahun ke 3 (T3)	57,750,000						√	57,750,000	57,700,000				57,700,000	99.91%			
50	Ulu Klubuk	MALAKA	NTT	Pembiayaan di SP Ulu Klubuk	60,000,000												60,000,000	-	0.00%		Blokir
51	Aurmios	MANOKWARI	PAPUA BARAT	Operasional Pengelola Permukiman Transmigrasi	19,000,000		2018								√	19,000,000	19,000,000	100.00%			
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Desa	3,600,000										√	3,600,000	3,600,000	100.00%			
52	Tomage Sp. 2	FAK FAK	PAPUA BARAT	Operasional Pendidikan	39,000,000		2016				√	39,000,000	39,000,000				39,000,000	100.00%			
				Insentif Kesehatan	12,000,000						√	12,000,000	12,000,000				12,000,000	100.00%			
				Operasional Kesehatan	3,600,000						√	3,600,000	3,600,000				3,600,000	100.00%			
				Perdin Kesehatan	1,383,000						√	1,383,000	1,383,000				1,383,000	100.00%			
				Pembinaan Mental Spiritual	7,200,000						√	7,200,000	7,200,000				7,200,000	100.00%			
				Ruiluk Pasien & Obat-obatan	12,050,000						√	12,050,000	12,050,000				12,050,000	100.00%			
				Operasional Pengelola Permukiman Transmigrasi	19,000,000										√	19,000,000	19,000,000	100.00%			
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Desa	3,600,000										√	3,600,000	3,600,000	100.00%			
				Pengendalian dan Monitoring Pengadaan Saprotan (Provinsi)	8,160,000						√	8,160,000	8,145,600				8,145,600	99.82%			
				Pengendalian dan Monitoring Pengadaan Saprotan (Kabupaten)	1,280,000						√	1,280,000	1,263,000				1,263,000	98.67%			
				Pengadaan Sarana Produksi Penempatan Tahun ke 3 (T3)	96,250,000						√	96,250,000	96,180,612				96,180,612	99.93%			
53	Kampung Maibuki	MANOKWARI SELATAN	PAPUA BARAT	Operasional Pengelola Permukiman Transmigrasi	19,000,000		2017								√	19,000,000	19,000,000	100.00%			
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Desa	3,600,000										√	3,600,000	3,600,000	100.00%			
54	Sp 1 Tempirai Selatan	PALI	SUMATERA SELATAN	Fasilitas Penumbuhan/Pembentukan Poktan/Gapoktan	22,500,000		2022	√	22,500,000	20,697,000							20,697,000	91.99%			
				Operasional Pengelola Permukiman Transmigrasi	19,000,000										√	19,000,000	18,700,000	98.42%			
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Desa	3,600,000										√	3,600,000	3,600,000	100.00%			
				Pengendalian dan Monitoring Pengadaan Saprotan (Provinsi)	6,280,000						√	6,280,000	6,240,000				6,240,000	99.36%			
				Pengendalian dan Monitoring Pengadaan Saprotan (Kabupaten)	4,050,000						√	4,050,000	1,609,700				1,609,700	39.75%			
				Pengadaan Sarana Produksi Penempatan Tahun ke 2 (T2)	68,500,000			√	68,500,000	68,015,000							68,015,000	99.29%			
				Pengadaan Sarana Produksi Penempatan Tahun ke 3 (T3)	80,850,000						√	80,850,000	79,621,500				79,621,500	98.48%			
55	Torire	POSO	SULAWESI TENGAH	Operasional Pengelola Permukiman Transmigrasi	19,000,000		2023	√	19,000,000	17,800,000							17,800,000	93.68%			
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Desa	3,600,000			√	3,600,000	3,600,000							3,600,000	100.00%			
				Pengendalian dan Monitoring Pengadaan Saprotan (Provinsi)	6,620,000						√	6,620,000	6,620,000				6,620,000	100.00%			
				Pengendalian dan Monitoring Pengadaan Saprotan (Kabupaten)	900,000						√	900,000	900,000				900,000	100.00%			
				Fasilitas Penumbuhan/Pembentukan Poktan/Gapoktan	22,500,000			√	22,500,000	21,000,000							21,000,000	93.33%			
				Pengadaan Sarana Produksi Penempatan Tahun ke 1 (T1)	48,750,000			√	48,750,000	48,750,000							48,750,000	100.00%			
				Pengadaan Sarana Produksi Penempatan Tahun ke 2 (T2)	102,750,000			√	102,750,000	101,932,500							101,932,500	99.20%			
				Operasional Pendidikan	15,000,000			√	15,000,000	15,000,000							15,000,000	100.00%			
				Insentif Kesehatan	12,000,000			√	12,000,000	12,000,000							12,000,000	100.00%			
				Operasional Kesehatan	3,600,000			√	3,600,000	3,600,000							3,600,000	100.00%			
				Perdin Kesehatan	1,510,000			√	1,510,000	1,500,000							1,500,000	99.34%			
				Pembinaan Mental Spiritual	7,200,000			√	7,200,000	7,200,000							7,200,000	100.00%			
				Ruiluk Pasien & Obat-obatan	8,200,000			√	8,200,000	7,792,100							7,792,100	95.03%			
56	Ujung Tanah	ACEH SELATAN	ACEH	Operasional Pengelola Permukiman Transmigrasi	19,000,000		2018								√	19,000,000	19,000,000	100.00%			
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Desa	3,600,000										√	3,600,000	3,600,000	100.00%			
57	Altrem	MAYBRAT	PAPUA BARAT DAYA	Operasional Pengelola Permukiman Transmigrasi			2018										-	-			
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Desa													-	-			
58	Puuhialu	KONAWA UTARA	SULAWESI TENGGARA	Operasional Pengelola Permukiman Transmigrasi			2024										-	-		#DIV/0!	
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Desa													-	-		#DIV/0!	
				Pengendalian dan Monitoring Pengadaan Saprotan (Provinsi)													-	-			
				Pengadaan Sarana Produksi Penempatan Tahun ke 1 (T1)													-	-		#DIV/0!	
	PUSAT																				
	Pusat			Monitoring evaluasi dan pengendalian fasilitasi penumbuhan/pembentukan poktan gapoktan di SP	234,932,000												234,932,000	-	0.00%		Blokir

NO	SP	KABUPATEN	PROVINSI	KEGIATAN	Rp	Penempatan Tahun	TAHAP PERKEMBANGAN SP										REALISASI Rp	% Rp	% Fisik	CAPAIAN OUTPUT	
							Tahap Penyesuaian			Tahap Pemantapan			Tahap Kemandirian								
							Cek list	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	Cek list	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	Cek list	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	Cek list					
	Pusat			Monitoring evaluasi dan pengendalian fasilitasi kelembagaan pemerintah dan masyarakat	140,450,000							√	140,450,000	140,142,966	√	140,142,966	99.78%				
	Pusat			Pengendalian dan monitoring pengadaan sarana produksi	432,720,000									432,720,000			-	0.00%		Blokir	
	Pusat			Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Usaha SP Bina Tahun 2024	353,930,000									353,930,000	353,835,000						
	Satker Pusat Non Fisik			Monitoring dan Pengendalian Kegiatan	484,000,000									65,200,000	-		97,800,000	-			
	Satker Pusat Non Fisik			Bimtek Pemetaan Jalan di Satuan Permukiman dan Pusat SKP	368,415,000							√	368,415,000	368,195,368	√	368,195,368	99.94%	100%	1 Kegiatan		
	Satker Daerah Non Fisik			Bimtek Pemetaan Jalan di Satuan Permukiman dan Pusat SKP	72,991,000									72,991,000	41,247,980		41,247,980	56.51%	100%	6 Satker	
	Pusat			Bantuan Perlengkapan PUSTU (Perjadin)	182,610,000									182,610,000	-		-	0.00%		Blokir	
	Pusat			Bantuan Sarana Sosial Budaya di Kawasan Transmigrasi (Perjadin)	192,708,000					√	192,708,000	163,358,609				√	163,358,609	84.77%			
	Pusat			Bantuan Sarana Seni Budaya, Olahraga, dan Pemberdayaan Generasi Muda (Perjadin)	155,616,000					√	155,616,000	145,912,267					145,912,267	93.76%			
	Pusat			Pembinaan dan Pengendalian Layanan Kesehatan	3,877,000		√	3,877,000	3,877,000									3,877,000	100.00%		
	Pusat			Peningkatan Kapasitas Pemberdayaan Perempuan dalam Penanganan Stunting di Satuan Permukiman di Sulawesi Tengah	100,937,000					√	100,937,000	100,858,600				√	100,858,600	99.92%			
	Pusat			Peningkatan Kapasitas Pemberdayaan Perempuan dalam Penanganan Stunting di Satuan Permukiman di Gorontalo	93,502,000					√	93,502,000	93,465,330					93,465,330	99.96%			
	Pusat			Dukungan Pendidikan Mahasiswa PPSBKT di Universitas Jenderal Soedirman	39,957,000								√	39,957,000	39,955,000		39,955,000	99.99%			
	Pusat			Dukungan Pendidikan Mahasiswa PPSBKT di UIN Raden Fatah Palembang	882,309,000								√	882,309,000	882,264,325	√	882,264,325	99.99%			
	Pusat			Dukungan Pendidikan Mahasiswa PPSBKT di STIT Hidayatullah Batam	172,998,000								√	172,998,000	172,987,900	√	172,987,900	99.99%			
	Pusat			Dukungan Pendidikan Mahasiswa PPSBKT di UIN Datokarama Palu	263,954,000								√	263,954,000	263,945,300	√	263,945,300	100.00%			
	Pusat			Dukungan Pendidikan Mahasiswa PPSBKT di Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia	1,023,819,000								√	1,023,819,000	1,023,787,500		1,023,787,500	100.00%			
	Pusat			Dukungan Pendidikan Mahasiswa PPSBKT di Universitas Gadjah Mada	16,784,000								√	16,784,000	16,776,790		16,776,790	99.96%			
	Pusat			Dukungan Pendidikan Mahasiswa PPSBKT di Universitas Khairun	89,657,000								√	89,657,000	89,653,500		89,653,500	100.00%			
	Pusat			Dukungan Pendidikan Mahasiswa PPSBKT di IAIN Ternate	91,372,000								√	91,372,000	91,369,000	√	91,369,000	100.00%			
	Pusat			Dukungan Pendidikan Mahasiswa PPSBKT di Universitas Sunan Giri Surabaya	47,244,000								√	47,244,000	25,500,000		25,500,000	53.98%			
	Pusat			Bimbingan Teknis dan Supervisi Peningkatan Administrasi Data Kependudukan Transmigrasi	46,742,000						46,742,000	-					-	0.00%		Blokir	
	Pusat			Video Profil Satuan Permukiman Menuju Tahap Kemandirian	200,000,000						200,000,000	199,475,880					199,475,880	99.74%			
	Pusat			Penetapan Buku	144,730,000										144,730,000	144,670,000		144,670,000	99.96%		
	Pusat			Dukungan Pendidikan Mahasiswa PPSBKT di STAI Bvaul Ulum Gresik	23,000,000								√	23,000,000	23,000,000		23,000,000	100.00%			
	Pusat			Dukungan Pendidikan Mahasiswa PPSBKT di IINITARA	32,000,000								√	32,000,000	32,000,000		32,000,000	100.00%			
	Pusat			Monitoring dan Evaluasi di Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan	314,760,000								√	314,760,000	298,545,753		298,545,753	94.85%			
	Pusat			Bantuan Sarana Sosial Budaya di Kawasan Transmigrasi	650,000,000					√	650,000,000	646,114,125				√	646,114,125	99.40%			
	Pusat			Bantuan Sarana Seni Budaya, Olahraga, dan Pemberdayaan Generasi Muda	400,000,000					√	400,000,000	398,385,000				√	398,385,000	99.60%			
					20,013,573,000						3,844,250,000	3,570,152,715			6,927,939,000	6,003,436,447		9,241,384,000	7,306,575,552		16,526,329,714

1	Pusat SKP	MERAUKE	PAPUA SELATAN	Peningkatan Jalan	824,550,000												824,336,000	99.97%	100%	0.75 km
2	Pusat SKP	LUIWU TIMUR	SULAWESI SELATAN	Rehab SD di Mahalona SKP C SP 1	100,000,000												99,555,000	99.56%	100%	1 unit

No.	Indikator Kinerja Utama	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Sisa
1	Penyesuaian	3,844,250,000	3,570,152,715	274,097,285
2	Pemantapan	6,927,939,000	6,003,436,447	924,502,553
3	Kemandirian	9,241,384,000	7,306,575,552	1,934,808,448
4	Persentase Jumlah Transmigrasi yang sudah Menerima SHM pada tahun ke-5	2,457,745,000	2,407,747,403	49,997,597
5	Jumlah Pusat SKP yang telah berfungsi sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan	924,550,000	923,891,000	659,000
6	Penyelesaian Masalah Pertanahan Transmigrasi	2,099,277,000	1,927,546,655	171,730,345
7	NSPK	657,900,000	634,201,535	23,698,465
	TOTAL	26,153,045,000	22,773,551,307	3,379,493,693

TARGET IKU	JUMLAH SP	REALISASI SP	CAPAIAN IKU
50%	26	26	50.00%
60%	24	24	60.00%
45%	40	40	45.00%
60%	-	-	61.41%
2 (SKP)	-	-	2 (SKP)
78 (Kasus)	-	-	89 (Kasus)
3 NSPK	-	-	3